

EDISI KHUSUS BELA NEGARA



11 R

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

EKSISTENSI KEGIATAN PARADE CINTA TANAH AIR (PCTA) DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA **BAGI GENERASI MUDA**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM DAN AGENDA BELA NEGARA DI KOMUNITAS PESISIR

KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI MODAL BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

BELA NEGARA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM

PERAN UNHAN SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA DALAM MENCETAK KADER INTELEKTUAL BELANEGARA

SEMARAK PESTA **OLAHRAGA, SEMANGAT BELA NEGARA!**

KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 🔰 Kemhan RI







Kemhanri







Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta

Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si. Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Serambi Redaksi



Para pembaca yang budiman,

Bela negara tidak hanya merupakan tanggung jawab TNI semata, melainkan juga segenap komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok/organisasi, sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) disebutkan "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".

Oleh karena itu dalam rangka terus menggalakan semangat bela negara, tim redaksi WIRA mengetengahkan edisi khusus Bela Negara dengan beberapa tulisan diantaranya: Ketahanan Nasional dan Bela Negara; Eksistensi Kegiatan Parade Cinta Tanah Air (PCTA) dalam Meningkatkan Semangat Bela Negara bagi Generasi Muda; Pemberdayaan Masyarakat Maritim dan Agenda Bela Negara di Komunitas Pesisir; Ketahanan Sosial sebagai Modal Bela Negara bagi Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar; Bela Negara dan Pemberdayaan Masyarakat Maritim; dan Peran Unhan sebagai Kampus Bela Negara dalam Mencetak Kader Intelektual Bela Negara; serta Semarak Pesta Olahraga, Semangat Bela Negara!.

Semoga Tulisan dalam Wira Edisi Khusus kali ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan akan Bela Negara.

Kami senantiasa mengharapkan juga partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email <u>redaksi.wira@kemhan.go.id</u>. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman <u>www.kemhan.go.id</u>.

Tim Redaksi

Daftar Isi

6

KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Nilai-nilai nasionalisme (*nationalism*) dan bela negara menjadi pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara (*national defence*) Indonesia yang tangguh dan kuat.

12

EKSISTENSI KEGIATAN PARADE CINTA TANAH AIR (PCTA) DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA

"Rasa cinta tanah air akan membangkitkan kerelaan berkorban demi meraih cita-cita dan kejayaan bangsa; Karakter tidak dapat dibeli dan tidak akan datang dengan sendirinya, untuk itu dengan penuh kesadaran, mari bersama kita bangun karakter bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan semangat bela negara."

18

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM DAN AGENDA BELA NEGARA DI KOMUNITAS PESISIR

Sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan laut yang sangat luas, Indonesia membutuhkan sebuah startegi pemberdayaan masyarakat maritim yang memiliki dimensi bela negara yang kuat.

24

KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI MODAL BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Letak 111 PPKT yang dekat dengan wilayah negara tetangga dan perairan internasional berkonsekuensi pada besarnya potensi ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat PPKT, terutama ancaman dari luar.



32

BELA NEGARA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah. Sumber daya kelautan merupakan bagian dari kepentingan nasional di laut, dan juga bagian dari aset penting bagi bangsa Indonesia.

40

PERAN UNHAN SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA DALAM MENCETAK KADER INTELEKTUAL BELA NEGARA

Unhan sebagai kampus Bela Negara telah memposisikan eksistensinya sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memfokuskan diri pada studi Ilmu Pertahanan dan bela negara untuk menyiapkan generasi pemimpin bangsa menjadi garda utama pertahanan bangsa yang maju dan modern.

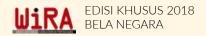
46

SEMARAK PESTA OLAHRAGA, SEMANGAT BELA NEGARA!

Keikutsertaan Indonesia dalam pentas olahraga dunia bukanlah hal yang baru. Namun demikian, *Asian Games* 2018 membuat berbagai pemangku kepentingan menjadi lebih sadar betapa Indonesia jauh tertinggal dari China yang selama 10 tahun terakhir secara berturutturut menguasai perolehan medali.

54

GALERI FOTO KEGIATAN BELA NEGARA



KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Oleh:

Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si. Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM Darto Wahidin, S.Pd.

Peneliti di Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM

Pendahuluan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengatakan <mark>ba</mark>hwa Indeks Ketahanan Nasional <mark>In</mark>donesia (IKN) telah mengalami <mark>pe</mark>nurunan tahun 2014-2015 pada gatra ideologi. Pada tahun 2014 indeks gatra ideologi berada pada kisaran 2,30 menjadi 2,23 pada tahun 2015. Sebanyak 12 Provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah mengalami pelemahan terkait dengan ketahanan ideologi. Dari 34 Provinsi di Indonesia, setidaknya ada 5 Provinsi yang berada dalam level cukup tangguh dan 28 Provinsi lainnya berada dalam level kurang tangguh (International Conference on Nusantara Philosophy, Faculty of Philosophy Gadjah Mada University, 1 November 2016).

Berselang satu tahun kemudian sebagaimana yang dilaporkan dalam hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dilakukan oleh Labolatorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, tahun 2016 telah terjadi peningkatan daripada tahun 2015. Dapat dilihat, pada 2015 sekitar 2,55 kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 2,60. Dalam proses pengukuran tersebut telah memperhatikan indeks dari delapan gatra, dengan variabel 108 dan indikator sebanyak 821. Namun, kondisi (condition) ketahanan nasional tahun 2016 tersebut masih dianggap kurang tangguh. Kurang tangguh disini juga dapat disebut sebagai suatu

peringatan (warning). Identifikasi kurang tangguh tersebut dapat diklasifikasikan yang meliputi kondisi lemah ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia, mungkin negara Indonesia untuk jangka pendek dapat bertahan dari AGHT.

Hasil indeks tahun 2016 telah terjadi peningkatan, padahal tidak semuanya mengalami peningkatan. Setidaknya dari keseluruhan atau delapan gatra yang ada, tiga di antaranya mengalami penurunan dan lima gatra lainnya mengalami peningkatan. Tiga gatra di antaranya mengalami penurunan yakni ideologi (*ideology*), sumber daya alam (natural resources), serta sosial dan budaya (social and culture). Sedangkan kelima gatra telah terjadinya peningkatan yakni geografi, demografi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Adapun dari delapan gatra tersebut, setidaknya tujuh berada pada kisaran dua yang artinya kurang tangguh. Hanya satu yang berada pada kisaran tiga yang di anggap cukup tangguh yakni pada masalah pertahanan dan keamanan.

Proses pengukuran indeks tersebut dengan menggunakan dua pendekatan, yakni jenis pendekatan kualitatif yang asalnya dari data kebijakan (policy) dan data kuantitatif dari data kinerja. Kedua data tersebut lalu disatukan kemudian menghasilkan indeks komposit yang dapat ketahanan menunjukkan nasional (national resilience) Indonesia. Indeks komposit di sini berasal dari kisaran

angka satu hingga lima. Adapun indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional yang rawan, indeks 2 menunjukkan kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 menunjukkan tangguh, dan indeks 5 itu sendiri menunjukkan sangat tangguh.

Dalam hal itu, sebagaimana survey The Fund for Place, yang terkait dengan indeks kerapuhan Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa Indonesia saat ini ada pada urutan ke-86 dari 178 negara-negara di dunia. Dalam hal ini Indonesia memperoleh



WiRA

elevated warning sebagai predikatnya, dan suatu saat dapat masuk dalam level high warning. Berdasarkan hasil survei lainnya yang terkait dengan masalah bela negara sebagaimana yang dilakukan pada negara-negara di dunia setidaknya survei tersebut dilakukan pada 106 negara, dan posisi ke-95 diduduki oleh Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa posisi yang sangat rendah sekali terkait bela negara. Keempat laporan dan data tersebut, menurut para ahli sesungguhnya disinyalir bahwa dampak yang sangat berpengaruh terhadap penurunan posisi tersebut berasal dari arus globalisasi.

Arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menjanjikan suatu kebebasan pada bidang ekonomi (economy), politik (politic), sosial-budaya (social-culture) maupun bidang yang lainnya, bahkan batasan dari sebuah negara

itu sendiri telah hilang karena terjadi arus gelombang yang begitu deras melalui piranti teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, globalisasi memberi dan membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Negara Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang, dari segi komposisi penduduk pada posisi keempat setelah China yang berada di Asia Timur, India di Asia Selatan, dan Amerika Serikat yang ada di Amerika Utara, sebenarnya dengan adanya arus globalisasi ini dapat menjadi peluang dan tantangan (opportunities and challenges) bagii Indonesia.

Esensi Ketahanan Nasional Melalui Bela Negara

Arus globalisasi yang terjadi sekarang, seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung (interconeted), tanpa batas (borderless), dan saling tergantung (interdependency), baik satu negara maupun lainnya di dunia ini. Dinamika globalisasi yang terjadi tersebut sudah masuk ke Indonesia. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus (Abdullah, 2006:77). Dalam konteks ini, Indonesia mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar, kemudian masuk ke Indonesia, sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat (society) Indonesia. Berhubung dengan itu, tentunya dalam nilai-nilai, kepribadian, dan karakter bangsa Indonesia akan bergeser dan bahkan mungkin di



anggap telah usang. Pada tataran mikro dari pola keseharian masyarakat (society) Indonesia ini, yang telah diwarnai pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang bersifat individualistik. Tataran makro dapat dilihat dengan adanya arus globalisasi itu sendiri, yaitu dari kurang tangguhnya ketahanan nasional Indonesia, sebagaimana dijelaskan di atas. Kondisi tersebut harus diperbaiki dan diselesaikan, karena dikhawatirkan pada jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional. Untuk kepulauan yang besar dimiliki dan posisi penduduk urutan keempat di dunia.

Oleh karena itu, kondisi tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian, karena dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat stabilitas nasional. mengganggu Sebagai negara kepulauan terbesar dan dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri, akan berdampak luas pada masyarakat

Indonesia. Berhubungan dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan UUD 1945, geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional (Armawi, 2011:62).

Sebagaimana yang dijelaskan Armawi (2011:62) terkait dengan pengertian ketahanan nasional, yang berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan (kuat), yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Sebagai sebuah strategi landasan konsepsional agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah (problem) bangsa Indonesia,

setidaknya dalam ketahanan nasional (national resilience) sendiri di analisis dengan menggunakan delapan pendekatan astagatra atau aspek dari kehidupan nasional, meliputi 3 aspek alamiah atau (trigatra), sifat trigatra sendiri bersifat statis, sedangkan aspek lima lainnya dalam kehidupan (pancagatra) yang selalu bersifat dinamis.

Setiap bangsa di dunia guna menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasional dari bangsa itu sendiri, diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengkajian ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan citacita proklamasi dan tujuan nasional (Armawi, 2011:63). Dalam konteks tersebut. sesungguhnya bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya





berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut.

Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti: tegaknya hukum dan ketertiban (law and order), terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and terselenggaranya prosperity), pertahanan dan keamanan (defence and security), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (juridical justice and social justice), serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (freedom of the people) (Wahyono, 1996).

Dalam lima tahun terakhir, posisi Indonesia dalam kondisi kurang tangguh, hal ini berdasarkan hasil yang dirilis oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya, salah satu yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan yakni bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2002, sudah diamanatkan terkait dengan bela negara ini. Kondisi kekinian yang terjadi di Indonesia, seharusnya bela negara dapat disesuaikan dalam penerapannya dengan programprogramnya melalui nilai-nilai yang adaptif dengan kekinian. Penyesuaian ini dilakukan supaya lebih menarik dan dapat menumbuhkan sikap bela negara guna dicarikan solusinya dari berbagai macam masalah di Indonesia.

Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Azhar, 2001:32).

Pendapat lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Wiyono dan Isworo (2007:3) mendefinisikan bela negara sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kedua pendapat tersebut, kemudian diperkuat lagi dengan pendapat Winarno (2007:186), bahwa sesungguhnya bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata untuk menghadapi musuh atau bela

negara yang bersifat militeristik. Dalam konteks bela negara ini, kemudian dapat dipahami menjadi dua klasifikasi dalam bela negara yakni ada yang fisik dan non fisik.

Nasionalisme dan Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Sejarah telah menguraikan dan mencatat bahwa pembentukan bangsa Indonesia, didasari oleh keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah. Keinginan untuk bebas dari penjajah ini, kemudian dibalut oleh sebuah rasa nasionalisme. Kebangkitan dan lahirnya rasa dan semangat nasionalisme di Indonesia, sesungguhnya dilihat dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia. Momentum besar yang terjadi di dunia tersebut, kemudian menginisiasi setidaknya tiga momentum besar di Indonesia, seperti tahun 1908 ada Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda terjadi tahun 1928, sampai pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Berangkat dari ketiga momentum besar tersebut, maka terbentuklah rasa nasionalisme Indonesia (nationalism) yang punya makna (meaning) nilai-nilai keindonesiaan. Rasa nasionalisme tersebut yang dapat memperkuat ketahanan nasional hingga saat ini, dalam cita-cita maupun tujuan negara (state).

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam negara secara fisik dapat bela dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Masih dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasinya. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat negara memiliki ketahanan nasional yang kuat (Febrihananto, 2017:80). Dengan demikian, kesadaran tersebut akan muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Adapun yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sesuatu itu yakni sejarah perjuangan akan masa lalu dalam berbagai momentum-momentum besar guna memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri, yang ingin bebas dari penjajahan.

Peran Bela Negara dalam Menentukan Kualitas Pertahanan dan Ketahanan Bangsa

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia, khususnya di Indonesia bahwa konsep pertahanan negara saat masa damai maupun masa perang didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang harus dipahami oleh semua warga negara. Melalui hal tersebut sesungguhnya diingatkan, bahwa setiap warga negara Indonesia maupun bangsa lainnya untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidup serta kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya *national resilience* harus dibina dan dikondisikan dari berbagai aspek, akan menentukan kualitas dari pertahanan negara itu sendiri, sehingga pertahanan negara (national defence) sangat terbalik lurus dengan ketahanan nasional (national resilience) Indonesia. Dengan demikian, setiap transformasi maupun pergeseran (shifting) yang terjadi pada ketahanan nasional akan berpengaruh juga pada pertahanan negara (national defence) sampai pada implementasinya.

Saat ini klasifikasi bela negara ini tidak pada pemahaman bahwa bela negara harus angkat senjata atau secara fisik, melainkan saat ini bela negara kontekstualisasinya jauh lebih luas bahkan paling lunak (soft) sampai pada bentuk yang keras (hard). Bela negara dalam bentuk lunak masuk klasifikasi aspek psikologis dan aspek fisik. Aspek psikologis ini yang tercermin dalam jiwa, karakter, sikap, bahkan jati diri dari setiap warqa negara. Dasar muara dari aspek psikologis ini pada prinsipnya akan dituangkan ke dalam pola melalui pikiran, karakter, maupun sikap akan mencerminkan kesadaran dalam bela negara. Adapun aspek fisik ini sendiri perwujudannya dalam bentuk tindakan nyata dalam berbagai keseharian negara, yang menjunjung negara Indonesia. Bela negara pada konteks keras (hard) merupakan bentuk hak dan kewajiban warga negara (the rights and obligations of citizens) yang diwujudkan secara fisik untuk menghadapi ancaman militer negara lain.

Dalam konteks yang lebih luas, negara sebenarnya telah menyusun suatu doktrin dan sistem pertahanan semesta, mekanismenya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan peran, tugas, dan tanggung jawab pada berbagai Komponen seperti Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Pemahaman yang sangat komprehensif terhadap Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, jika terselenggara dengan baik, maka dapat memperkuat dan memperbesar dari Komponen Utama itu sendiri. Klasifikasi bela negara dari yang lunak sampai keras tidak boleh terputus dan harus berkelanjutan. Bahkan sangat sulit dipungkiri saat ini memberikan pemahaman dan meningkatkan peran bela negara lebih kompleks maupun komprehensif

pada saat masa damai menjadi kunci keberhasilan dari terselenggaranya peran bela negara agar dapat menentukan kualitas dari pertahanan negara (*national defence*) Indonesia.

KESIMPULAN

Nilai-nilai nasionalisme (*nationalism*) dan bela negara menjadi pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara (national defence) Indonesia yang tangguh dan kuat. Kedua komponen tersebut menjadi prasyarat dari sudut pandang (viewpoint) harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus menerus, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela negara bukan hanya sebuah retorika melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa mempunyai

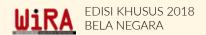
tanggung jawab untuk memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dari perspektif ketahanan nasional.***

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Armawi, Armaidy. 2011. Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azhar, Muhammad, 2001, Perspektif Islam Tentang Bela Negara, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. VI No. 1 April 2001.
- Febrihananto, Erdi Wikan, Abdullah, Irwan, Zubaidi, Ahmad, 2017, Partisipasi Pemuda Purna Paskibraka Indonesia dalam Kegiatan Bela Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Tentang Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Ketahanan nasional, Vol. 23 No. 1 27 April 2017.

- Wahyono, SK. 1996. *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional.*Jurnal Ketahanan Nasional. Program Studi
 Ketahanan Nasional SPs UGM, Yoqyakarta.
- Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiyono, Hadi dan Isworo. 2007.
 Kewarganegaraan. Jakarta: Interplus.





EKSISTENSI KEGIATAN PARADE CINTA TANAH AIR (PCTA) DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA

Oleh: Mayjen TNI Muhammad Nakir, S.IP., M.H. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI



Pendahuluan

<mark>"R</mark>asa <mark>cint</mark>a tanah air akan membangkitkan kerelaan berkorban de<mark>mi</mark> meraih cita-cita dan kejayaan ba<mark>ng</mark>sa; Karakter tidak dapat dibeli dan tidak akan datang dengan sendirinya, untuk itu dengan penuh kesadaran, mari bersama bangun karakter bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan semangat bela negara." Pesan filosofis Menteri Pertahanan Ryacudu, RI, Ryamizard yang disampaikan dalam acara pembukaan Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Tahun 2018 di atas, mencerminkan arti pembangunan penting karakter bangsa dan kesadaran bela negara, khususnya bagi generasi muda. Pembangunan karakter bangsa dan kesadaran bela negara tersebut menjadi prasyarat mutlak yang harus disiapkan untuk dapat mewujudkan sistem pertahanan semesta, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 yang menguraikan bahwa salah satu tujuan strategis pertahanan negara adalah mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas-tugas bela negara tidak hanya merupakan tanggung jawab TNI semata, melainkan juga segenap komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok/organisasi, sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, upaya bela negara di samping sebagai



kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Perkembangan lingkungan menimbulkan strategis telah dampak perubahan ancaman yang menjadi semakin kompleks dan dinamis bagi bangsa Indonesia. Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam rancangan "Visi Indonesia 2045" telah merumuskan Megatren Dunia 2045 yang meliputi: perubahan Geo politik dan Geo ekonomi yang ditandai dengan fenomena kebangkitan Asia; demografi dunia yang cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dan menjadikan bonus

demografi sebagai peluang menguntungkan bagi Indonesia; meningkat/menguatnya semakin global, perdagangan urbanisasi internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, dan persaingan sumberdaya alam; serta semakin signifikannya perubahan iklim dan kemajuan teknologi.

Salah satu faktor pendorong utama munculnya Megatren di atas adalah emerging kekuatan technoloav yang mengantarkan masyarakat memasuki Era Revolusi dunia Industri 4.0 dengan karakteristik Volatility, Uncertainty, Complexity, *Ambiguity* dan (VUCA)yang semakin signifikan. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pergeseran nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia hanya tidak memiliki intelektualitas tinggi dan mampu

beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi, melainkan juga harus memiliki kualitas sikap mental dan perilaku cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sumberdaya manusia berkualitas tersebut menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjamin dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa cinta tanah air merupakan nilai yang sangat penting untuk ditanamkan sebagai pembentuk sikap dan perilaku bela negara bangsa indonesia, yang menjadi bagian dari revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi dinamika ancaman yang kompleks dan multidimensional. Terkait hal tersebut, sebagai salah satu bentuk program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Kementerian

Pertahanan (Kemhan) dengan melibatkan instansi vertikal di daerah dan pemerintah daerah setempat menyelenggarakan lomba sejak tahun 2012, yang hingga saat ini telah ditetapkan menjadi program tahunan Direktorat Jenderal Strategi Kemhan, Pertahanan sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara. Lomba PCTA diawali dari tingkat daerah dalam rangka menghimpun generasi muda berpotensi yang ada di tiap-tiap provinsi, dan selanjutnya pemenang di tingkat daerah berhak mewakili masing-masing provinsi untuk berlomba di tingkat pusat/ nasional. Dalam rangka mewujudkan pembinaan yang berkelanjutan, untuk mewadahi ajang komunikasi, kepentingan monitoring/ serta pengelolaannya, maka para peserta yang telah mengikuti lomba PCTA selanjutnya dihimpun dalam suatu wadah organisasi Alumni PCTA. Melalui wadah organisasi tersebut, para alumni PCTA dapat saling berinteraksi dan turut membantu menggalakkan program PKBN dengan menyelenggarakan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan pendidikan di wilayah provinsi setempat maupun kegiatan bersama pada level nasional.

Lomba PCTA dan program Alumni PCTA sejak mulai diinisiasi hingga saat ini telah banyak menarik minat generasi muda di berbagai daerah. Materi lomba PCTA dari tahun ke tahun terus dievaluasi serta mengalami perubahan dan penyempurnaan agar dapat semakin efektif mencapai tujuan/sasaran telah ditetapkan. lomba di antaranya meliputi debat/ diskusi, tulisan ilmiah, keterampilan, hingga ajang kreativitas dan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, programprogram pembinaan lanjutan dalam wadah alumni PCTA juga mampu memberikan daya tarik bagi para mantan peserta lomba PCTA untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan sosialisasi bela negara serta menyalurkan aspirasi, bakat, dan kreasi mereka yang bermanfaat untuk mendukung PKBN. Dengan kata lain, eksistensi program PCTA semakin meningkat dan dapat menjadi salah satu program andalan mendukung pencapaian untuk target 100 juta kader bela negara pada tahun 2024, sebagaimana telah dicanangkan oleh Menteri Pertahanan.



PCTA Sebagai Pembangkit Semangat Bela Negara Generasi Muda

PCTA difokuskan untuk mendukung program PKBN pada lingkungan pendidikan. Target peserta PCTA adalah para mahasiswa perguruan tinggi dan pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat di seluruh wilayah NKRI. Generasi muda menjadi obyek sasaran program PCTA mengingat cinta tanah air sebagai salah satu nilai dasar bela negara perlu senantiasa ditanamkan pada generasi penerus pembangunan nasional sumberdaya manusia potensial yang harus disiapkan secara dini untuk kepentingan penyelenggaraan sistem pertahanan semesta.

Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan terpadu, terarah, secara total, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan keutuhan negara, wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Bunyi Pasal 1 tersebut mengandung makna bahwa proses penyiapan sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara, baik (jasmani) maupun nonfisik (mental spiritual), pada hakikatnya tidak dapat berlangsung secara instan, namun harus diselenggarakan seawal mungkin tanpa menunggu munculnya ancaman terlebih dahulu, serta harus berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk menjamin kesiapannya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.



Dengan demikian, kegiatan PCTA yang waktunya berlangsung singkat bukanlah program yang ditujukan untuk secara instan membentuk generasi muda meniadi generasi unggul dengan dilandasi kesadaran bela negara yang kuat. PCTA pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk memancing atau memicu bangkitnya semangat bela negara di kalangan generasi muda. Dengan terpicunya semangat bela negara, maka diharapkan akan dapat terbangun situasi yang kondusif untuk menjalankan proses pembangunan karakter bangsa sebagai core value yang harus terinternalisasi dalam sistem pertahanan negara, dimana penyelenggaraannya berlangsung secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Meskipun lomba PCTA di tingkat daerah/provinsi dan tingkat pusat/nasional, hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun kegiatan tersebut terus berlanjut secara berkala setiap tahun dan dalam rentang waktu antaranya diisi dengan beragam kegiatan alumni bela negara, sehingga ajang lomba PCTA tersebut menjadi event dan

momentum penting bagi para pelajar dan mahasiswa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Daya tarik lomba PCTA dan gaungnya yang kian meluas, dengan jumlah alumni yang semakin meningkat, meyakinkan kita bersama bahwa di tengah meningkatnya kerawanan dari berbagai dimensi (ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya) yang diiringi dengan semakin menguatnya ancaman nyata (termasuk penyalahgunaan Narkoba serta berbagai kenakalan remaja dan tindak kriminal lainnya), kita percaya bahwa di dalam jiwa generasi muda Indonesia sesungguhnya tersimpan bibit-bibit kecintaan pada tanah airnya. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus membangkitkan semangat bela negara di kalangan generasi muda, diantaranya melalui kegiatan PCTA, agar mampu bertahan dari terpaan berbagai pengaruh negatif yang terus menggerus nilai-nilai bela negara di masa kini dan masa mendatang.

Eksistensi PCTA dalam Lintasan Waktu

Lomba PCTA untuk pertama

kalinya diselenggarakan pada tahun 2012 yang diikuti oleh peserta hanya dari tingkat SLTA. Mengingat baru pertama kalinya diselenggarakan, Kemhan pada saat itu masih menjajaki formulasi/materi lomba yang efektif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PCTA, sehingga diputuskan untuk bekerja sama dengan asosiasi wartawan media cetak dan elektronik dalam mengelola pelaksanaannya dengan format berupa lomba debat. Lomba debat tersebut terus dipertahankan pada kegiatan PCTA tahun berikutnya.

Pada tahun 2014 format lomba debat dirubah menjadi lomba diskusi dengan pertimbangan bahwa istilah "diskusi" akan dipersepsikan publik lebih positif dan bersifat membangun dibandingkan dengan istilah "debat". Kali ini materi lomba diskusi mulai dirancang sendiri oleh Kemhan dengan bantuan dari kalangan perguruan tinggi. tahun 2014 juga mulai dipikirkan bagaimana kelanjutan pembinaan bagi para mantan peserta PCTA sehingga program PKBN tidak terputus atau dapat berlangsung secara berkesinambungan dan lebih terstruktur. kepentingan Terkait sejak tahun 2014 tersebut, terbentuklah Alumni PCTA sebagai wadah pembinaan kader bela negara di daerah. Dalam perkembangannya, saat ini Alumni PCTA telah memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di tingkat daerah yang berada di bawah pembinaan Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) dan juga di tingkat pusat/nasional yang berada di bawah pembinaan Kemhan.

Format, mekanisme dan materi PCTA berulang kali disempurnakan seiring dengan terus dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan lomba-lomba PCTA yang telah berlangsung sebelumnya. Peserta lomba yang semula hanya pelajar SLTA atau yang sederajat, sejak tahun 2015 bertambah dengan adanya peserta dari mahasiswa untuk tingkat perguruan tinggi, diikuti dengan penambahan materi berupa karya tulis ilmiah. Format diskusi lomba tetap bertahan penyelenggaraan hingga **PCTA** tahun 2016 dengan materi yang senantiasa diperbaiki/direvisi. Pada tahun 2017 lomba diskusi di tingkat Pusat dikombinasikan dengan keterampilan. Selanjutnya pada lomba PCTA yang baru saja berlangsung pada September 2018 lalu format lomba ditingkatkan kreativitas menjadi ajang karya inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara nyata bagi masyarakat. Juara pertama lomba PCTA Tahun 2018 untuk tingkat perguruan tinggi diraih oleh Universitas Cendrawasih Provinsi Papua dengan karyanya yang berjudul "beras analog berbahan dasar sagu yang diformulasikan dengan daun kelor dan buah merah". Sedangkan juara pertama Lomba PCTA Tahun 2018 untuk tingkat SLTA diraih oleh SMKN 1 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dengan karyanya yang berjudul pemanfaatan pestisida nabati sebagai upaya pengendalian hama pada tanaman cabai dan tanaman pertanian.

Sejak 2012 hingga 2018 jumlah peserta PCTA tiap tahun rata-rata mencapai sekitar 4.000 orang, sehingga sampai dengan saat ini jumlah alumni PCTA sudah hampir mencapai 30.000 orang. Adapun gambaran jumlah peserta PCTA dari tahun ke tahun dan perkembangan jumlah alumni PCTA sebagai kader bela negara dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik Perkembangan Jumlah Peserta PCTA Per Tahun



Sumber: Ditrah Ditjen Strahan Kemhan, 2018 (data diolah)

Kegiatan lomba **PCTA** tingkat daerah sejak awal penyelenggaraannya di tahun 2012 telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan dikoordinir oleh masing-masing instansi vertikal perwakilan Kemhan di tiap provinsi, dengan bantuan dan dukungan dari komando teritorial TNI AD dan satuan TNI lainnya yang ada di wilayah, serta Pemerintah Daerah setempat. Dengan demikian, program PCTA pada hakikatnya juga dapat menjadi wadah bagi penguatan sinergitas Kementerian/ antar Lembaga dan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama mensukseskan PKBN di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Tantangan dan Harapan

Di balik keberhasilan penyelenggaraan PCTA terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi. Diantaranya adalah masalah keberadaan PKP di daerah yang masih bersifat *ad-hoc* dengan segala keterbatasannya dari sisi organisasi dan sumber

daya. Hal ini dapat mengakibatkan sangat masih bergantung PKP membutuhkan dukungan/ dan bantuan Pemda, satuan TNI dan institusi lainnya di daerah untuk dapat menyelenggarakan program PCTA di daerah secara optimal. Terkait permasalahan tersebut, pihak Kemhan dan PKP secara intensif melakukan sosialisasi dan pendekatan untuk meningkatkan sinergitas dengan pihak Pemda, termasuk kantor pendidikan tinggi dan pendidikan nasional di daerah, lembaga-lembaga pendidikan tingkat SLTA dan perguruan tinggi, serta satuan-satuan TNI di daerah. Hasil sosialisasi dan pendekatan ini cukup signifikan, dimana pada sejumlah daerah kegiatan PCTA sudah diintegrasikan ke dalam kalender kegiatan/program kerja Pemda. Dengan demikian, sebagian Pemda mulai turut andil dalam pengelolaan lomba tingkat daerah, **PCTA** diantaranya adalah Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, serta sejumlah daerah lainnya. Melalui kerja sama dengan kantor pendidikan tinggi dan pendidikan nasional di daerah

serta lembaga-lembaga pendidikan tingkat SLTA dan perguruan tinggi, juga diharapkan jadwal kegiatan PCTA akan semakin tersinkronisasi dengan jadwal kegiatan sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat diatur supaya tidak bersamaan dan tidak mengganggu pelaksanaan ujian, praktek kerja, masa liburan, dan sebagainya.

Selain itu, monitoring dan pengelolaan para alumni **PCTA** juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi mereka telah lulus dan pindah domisili ke wilayah/daerah lain. Saat ini Kemhan melalui PKP dan dibantu oleh pengurus Alumni PCTA terus berupaya menghimpun data serta mengarahkan para alumni PCTA apabila pindah ke daerah lain agar melaporkan diri dan bergabung ke organisasi alumni PCTA setempat, sehingga dapat tetap berkontribusi aktif dalam program-program alumni PCTA untuk mendukung PKBN.

tidak kalah Tantangan yang adalah sinkronisasi pentingnya antara PCTA dengan programprogram dengan muatan bela negara lainnya, sehingga seluruh program PKBN dapat terintegrasi dan dijalankan secara terpadu. Sebagai solusinya, baru-baru ini telah diajukan pengaturan kewenangan satuan kerja di lingkungan Kemhan penyelenggaraan terkait **PKBN** sesuai tabel.

Seiring dengan kian rentannya generasi muda terhadap dinamika dan kompleksitas ancaman yang semakin sulit diprediksi di masa depan, diharapkan program PCTA akan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan pencapaian sasaran PKBN, terutama untuk mempertahankan dan

Tabel Kewenangan Satuan Kerja Kemhan dalam Penyelenggaraan PKBN

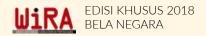
Ditjen Pothan	Badiklat	Ditjen Strahan	PKP di Daerah
Merumuskan kebijakan perencanaan PKBN Melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai bela negara bagi seluruh WNI Melakukan sertifikasi bela negara di tingkat Pusat dan Daerah Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKBN di tingkat Pusat dan Daerah Melaksanakan pendataan kader bela negara secara terpadu skala nasional	Membentuk dan membina fasilitator bela negara/melakukan pendidikan lanjutan fasilitator (Training of Facilitator/ToF) kader bela negara Menjalankan Diklat bela negara bagi K/L dan Pemda Melakukan supervisi teknis terhadap pembentukan kader bela negara di tingkat daerah Melakukan pendataan kader bela negara yang dibentuk oleh Badiklat	Mengarahkan pembentukan kader bela negara, pembinaan kader bela negara, serta fasilitasi penguatan dan pemberdayaan kader bela negara di tingkat daerah Mengarahkan pendataan kader bela negara di tingkat daerah	Melaksanakan pembentukan kader bela negara, pembinaan kader bela negara, serta fasilitasi penguatan dan pemberdayaan kader bela negara di tingkat daerah Melakukan pendataan kader bela negara di tingkat daerah Ingkat daerah

Sumber: Ditjen Pothan Kemhan, 2018

memperkuat nilai-nilai bela negara di kalangan generasi muda. Di masa depan kegiatan PCTA diharapkan tidak bersifat statis dengan hanya mengandalkan event lomba saja, melainkan menjadi lebih dinamis dengan mengembangkan programprogram andalan lainnya yang dapat memancing dan membangkitkan tumbuhnya rasa cinta tanah air. Terkait hal tersebut, keberadaan quide-line roadmap yang dan difokuskan untuk kemajuan dan pemanfaatan kegiatan efektifitas PCTA semakin dirasakan menjadi kebutuhan, sehingga suatu eksistensi dan kontribusinya dalam pembangunan karakter bangsa akan semakin menguat dan terus diperhitungkan di masa mendatang.

Penutup

Pada hakikatnya bentuk pembangunan nasional yang paling hakiki adalah pembangunan karakter bangsa, dimana generasi muda menjadi faktor paling kritis yang akan menentukan keberhasilan perjuangan suatu bangsa dan negara dalam meraih tujuan dan cita-cita nasionalnya. PCTA sesungguhnya dapat menjadi salah satu jawaban yang tepat atas tantangan tersebut. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan program tidak hanya dalam mendukung penyelenggaraannya, namun juga dalam penguatan political will dari para pejabat di tingkat Pusat hingga Koordinasi, kerja sama dan saling sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kata kunci keberhasilan untuk dapat memperkuat eksistensi PCTA dalam meningkatkan semangat bela negara bagi generasi muda harapan bangsa Indonesia.***



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM DAN AGENDA BELA NEGARA DI KOMUNITAS PESISIR

Oleh:

Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia

Sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan laut yang sangat luas, Indonesia membutuhkan sebuah startegi pemberdayaan masyarakat maritim y<mark>an</mark>g memiliki dimensi bela negara yang kuat. Strategi ini penting selain dalam konteks memberdayakan masyarakat secara ekonomi, juga untuk memberdayakan mereka dalam rangka mendukung aktivitas komponen utama pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan demikian, agenda bela negara yang dimaksud bisa memiliki dimensi yang beragam, dari mulai sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

Data terakhir yang dirilis oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 atas kerjasama Kemenko Maritim, BIGS dan Pushidros TNI AL menunjukkan bahwa luas laut Indonesia adalah 6,4 juta km persegi yang terdiri dari: laut territorial 290 ribu km persegi, zona tambahan 270 ribu km persegi, ZEE 3 juta km persegi, perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km persegi, dan landas kontinen 2,8 juta km persegi. Sementara panjang garis pantai 108 ribu km dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau dengan 16.056 pulau telah dibakukan dan disubmisi ke PBB (Mongabay, 2018).

Di sisi lain, tantangan keamanan maritim Indonesia sampai hari ini terus berkembang, dari mulai aktivitas illegal fishing oleh nelayan negara tetangga, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, perdagangan manusia serta perdagangan satwa liar illegal yang menggunakan jalur laut. Belum lagi alur laut kepulauan Indonesia yang digunakan oleh banyak kapal asing, baik kapal dagang, maupun kapal perang negara lain. Hal ini menambah kompleksitas persoalan keamanan maritim di Indonesia.

Sementara itu, nelayan-nelayan Indonesia yang sebagian besar



tinggal di wilayah pesisir merupakan representasi komunitas masyarakat maritim yang lebih luas. Para nelayan itu berbagi peran dengan komunitas masyarakat maritim Indonesia lain, seperti para pelaut, petambak ikan, pegiat pariwisata laut, dan jenis-jenis profesi lain yang hidupnya bergantung laut. Sebagai kelompok pada masyarakat yang tinggal di pesisir dan beraktivitas di laut, sebagian besar dari mereka sering bersinggungan dengan batas-batas wilayah laut negara tentangga. Ada yang ketika melaut tanpa disadari masuk ke laut negara wilayah tetangga, berhadapan dengan aparat keamanan atau militer negara tetangga, bahkan ada juga yang menjadi korban dan sandera dari aktivitas perompakan negara tetangga. Sebaliknya, ketika beraktivitas secara normal di perairan Indonesia, mereka seringkali juga aktivitas-aktivitas menyaksikan kejahatan maritim, ataupun manuver kapal perang dan kapal selam negara asing di perairan nasional.

Ironisnya, pada September 2017, BPS menyatakan bahwa jumlah nelayan miskin berkontribusi sebesar 20% dari total penduduk di tanah air atau sekitar 5,2 juta orang. Hal ini agak membaik sedikit dari data BPS tahun 2011 yang menyebutkan jumlah nelayan miskin di Indonesia sebanyak 7,87 juta orang atau 25,14% dari total penduduk miskin. Penurunan ini salah satunya disebabkan semakin menurunnya jumlah keluarga nelayan di Indonesia. Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudiiastuti menvatakan bahwa jumlah keluarga nelayan 10 tahun lalu sebanyak 1,6 juta, sementara pada tahun 2017 hanya tersisa sebanyak 800 ribu keluarga. Penurunan jumlah nelayan disebabkan banyak dari mereka yang alih profesi menjadi buruh, tukang bangunan, tukang becak, ojek, atau yang lainnya (detikfinance, 2017).

Dengan potensi kemaritiman yang begitu besar, ditambah tantangan keamanan maritim yang nvata dihadapi oleh Indonesia, agenda bela negara dalam konteks maritim menjadi urgen untuk dijalankan. Agenda bela negara maritim yang diperuntukkan bagi masyarakat maritim, khususnya para nelayan yang wilayah jelajahnya langsung berhadapan dengan wilayah laut negara tetangga. Agenda bela negara maritim yang juga diharapkan dapat menuntaskan persoalan kemiskinan yang didera oleh para nelayan. Agenda bela negara yang bisa sekaligus meningkatkan kapasitas sosial ekonomi para nelayan tersebut. Oleh karenanya, agenda bela negara maritim yang dimaksud haruslah memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir.

Aspek Maritim dalam Bela Negara

Selain telah disebutkan di dalam UU 1945 Pasal 27 ayat 3, salah satu praktek nyata dari bela negara adalah rasa cinta yang besar terhadap tanah airnya. Frasa tanah air sejatinya





mengedepankan dua hal pokok, yaitu "tanah" dalam arti daratan fisik Indonesia dan segala yang ada di atas dan di dalamnya, serta "air" yang lebih ditekankan pada laut beserta segala sesuatu yang ada di permukaan, di dalam dan di dasarnya. Oleh karenanya, kecintaan bangsa Indonesia terhadap tanahnya, semestinya juga seimbang dengan kecintaan bangsa ini terhadap lautnya. Representasi dari kecintaan terhadap laut ini kemudian bisa dijadikan dasar penting, bagaimana membangun satu kerangka bela negara yang mengedepankan aspek kelautan, atau kemaritiman.

Dengan mengedepankan aspek maritim dalam konteks bela negara, maka entitas sosial di Indonesia, baik yang sifatnya formal maupun non formal, struktural maupun kultural, adalah subyek penting dari program dan kegiatan ini. Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki domain kemaritiman merupakan bagian integral dari pengedepanan aspek maritim dalam program bela negara. Pemerintah yang memiliki domain maritim adalah institusi formal yang di dalam tupoksinya memiliki kewenangan dalam konteks penegakan hukum di laut dan pengelolaan sumber daya laut. Sementara masyarakat maritim adalah suatu masyarakat yang mendiami yang secara wilayah langsung berdampingan dengan laut ataupun perkampungan nelayan, memenuhi kebutuhan hidupnya dari laut, serta berbagi identitas sosial dan ikatan sosial yang saling menguntungkan terkait emosi dan kewajiban sosial dalam kegiatan mereka sehari-hari (Octavian & Yulianto, 2014:20).

Landasan pemikiran dari keterlibatan kedua golongan entitas tersebut adalah konsepsi *Maritime Domain Awareness* atau *MDA. MDA* sendiri oleh Marsetio (2014:47) dimaknai sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencarikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Kendati nampak umum, definisi tentang MDA selama ini memang lebih banyak menyentuh persoalanpersoalan keamanan maritim dengan stakeholders kemaritiman suatu negara. Tetapi benang merah yang perlu kita tekankan dalam konteks ini, adalah titik beratnya pada kesadaran tentang laut sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi kepentingan nasional. Pada titik inilah kesadaran bela negara menemukan kontekstualitasnya dalam aspek kemaritiman.

Jika pada tingkat penyelenggara negara atau pemerintah, aspek kemaritiman dalam bela negara bisa diintegrasikan dengan aturan perundangan yang mengatur wewenang mereka dalam praktik penegakan hukum di laut, termasuk dalam menghadapi gangguan pertahanan dan keamanan di laut oleh pihak luar. Sejauh ini ada 18 peraturan perundangan yang mengikat belasan kementerian dan lembaga dalam upaya penegakan hukum di laut. Sumber daya pemerintah yang besar ini, semestinya bisa menjadi dasar dalam menjalankan agenda-agenda bela negara pada aspek kemaritiman.

Di satu sisi, jumlah masyarakat maritim yang cukup besar dengan nelayan sebagai kelompok yang paling utama, semestinya juga bisa menjadi sumber daya yang potensial dalam upaya menjalankan agenda bela negara dari aspek kemaritiman. Agenda bela negara aspek maritim yang diarahkan bagi penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Penguatan ketahanan sosial ekonomi ini penting agar masyarakat pesisir memiliki daya tahan yang kuat untuk menjalankan agenda bela

negara yang menyentuh persoalanpersoalan keamanan maritim yang lebih luas.

Pemberdayaan Masyarakat Maritim Berdimensi Bela Negara

Pemberdayaan masyarakat maritim yang memiliki dimensi bela negara dibutuhkan oleh komunitas masyarakat maritim di wilayah pesisir yang memiliki tingkat gangguan keamanan maritim yang tinggi. Dengan demikian, dua tujuan penting, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam upaya mengatasi potensi ancaman keamanan maritim dapat dicapai.

Pemberdayaan masyarakat sendiri secara klasik diartikan oleh Pyakuryal (1993:58) sebagai satu pendekatan pembangunan pedesaan yang lebih fokus pada interaksi manusia di dalam satu lingkup geografi yang terbatas, sehingga diperoleh satu pembangunan desa yang memiliki perspektif ekologis. Sementara menurut Payne (1997:26) pengembangan masyarakat atau community empowerment bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait hajat hidupnya sendiri yang seringkali terhalang oleh hambatan personal. Oleh dibutuhkan karenanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk menggunakan kekuasaan yang berasal dari lingkungan mereka. Adi (2008:80) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat betujuan mestilah akhir peningkatan pada upaya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, ia menyentuh beragam bidang kehidupan dalam masyarakat, seperti sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, sipirtual, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya.





Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai satu intervensi sosial yang menitikberatkan pada penguatan institusi sosial di masyarakat sehingga persoalan-persoalan sosial yang ada bisa dicarikan jalan keluarnya. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada bisa upaya pengembangan ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi dan modalitas yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, seperti sumberdaya alam, local wisdom, tradisi dan budaya, sumber daya manusia, nilai dan norma sosial. Pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal komunitas

Dalam konteks maritim, pemberdayaan masyarakat merupakan satu intervensi sosial yang dilakukan pada komunitas masyarakat maritim yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir di tingkat lokal dengan memanfaatkan potensi dan modalitas maritim yang ada di satu wilayah. Sementara dimensi bela negara dari pemberdayaan masyarakat maritim adalah pengintegrasian nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat yang menjadi subyek dari kebijakan tersebut

Atas dasar pandangan tersebut, bentuk-bentuk maka program pemberdayaan masyarakat maritim, seperti halnya: pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan tangkap; pemberdayaan wilayah pertahanan laut; program diklat pemberdayaan masyarakat bagi anak buah kapal nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya rumput laut serta tambak, serta pengembangan wilayah hutan mangrove dalam rangka melindungi ekosistem pesisir, haruslah senantiasa menempatkan dua imperatif

yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu kesejahteraan masyarakat, dan semangat bela negara.

Pemberdayaan masyarakat maritim yang memiliki dimensi bela negara, atau kegiatan bela negara dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, secara internal dapat meningkatkan kualtias sumberdaya manusia masyarakat pesisir dan nelayan sehingga secara umum ketahanan sosial masyarakatnya juga akan menguat. Kuatnya ketahanan masyarakat akan mengurangi munculnya potensi kejahatan dari dalam struktur serta memudahkan negara jika suatu saat harus melakukan mobilisasi umum atas ancaman yang sifantya nyata dan konkrit. Secara mendasar hal ini juga akan mengurangi resiko atas gangguan keamanan maritim di wilayah tersebut.



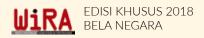
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat maritim yang akan dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara sebisa mungkin didesain dengan memuat materi-materi bela negara yang telah disusun oleh Kementerian Pertahanan. Sebaliknya, programprogram bela negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sudah lebih banvak saatnva kelompok-kelompok menyasar masyarakat maritim yang dalam kesehariannya sering beraktivitas di laut dan bersentuhan dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, atau bahkan mungkin aparat penegak hukum negara tetangga. Program bela negara yang bukan hanya sebatas penyampaian materi terkait bagaimana masyarakat bisa berperan dalam upaya bela negara yang memiliki aspek maritim, tetapi juga dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga upaya negara

untuk menumbuhkan *spirit* bela negara di kalangan masyarakat juga memiliki nuansa penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat yang lebih konkrit. Dengan begitu, penguatan secara internal bisa diperoleh, dan kemampuan masyarakat membantu pemerintah dalam menangkal bentuk-bentuk gangguan keamanan maritim juga bisa diupayakan.****

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi R, 2008, Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Press
- Marsetio, 2014, Sea Power Indonesia, UNHAN Press
- Octavian, A. & Yulianto B.A., 2014, Budaya, Idenitas, dan Persoalan Keamanan Maritim.
- Praktik Sosial Melaut di Banten, UNHAN Press

- Payne, Malcolm, 1997, Modern Social Work Theory 2nd ed, London, Macmillan Press Ltd.
- Pyakuryal, Kailash, 1993, Community Development as Strategy to Rural Development, in Ocassional Paper on Sociology and Antropologhy Vol.3, 1993, pg 58-68, Central Departement of Sociology and Antropologhy, Tribuvan University, Kathmandu.
- http://www.mongabay. co.id/2018/08/27/pemerintahkeluarkan-data-resmi-wilayah-kelautanindonesia-apa-saja-yang-terbaru/
- https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-3413124/berapajumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi.



KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI MODAL BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Oleh:

Sandy Nur Ikfal Raharjo Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PPKT

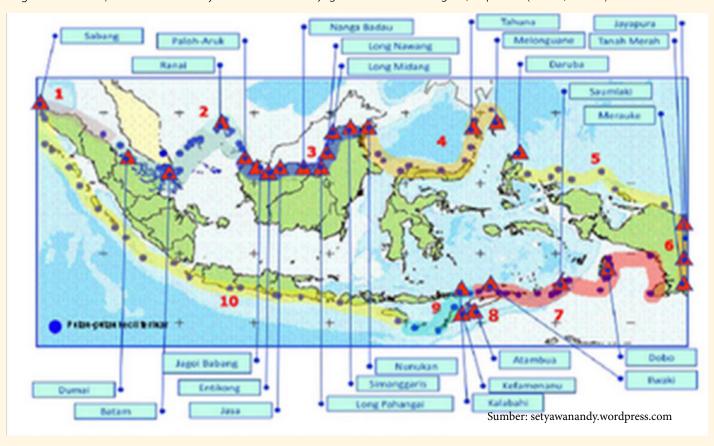
Rentannya Masyarakat ter<mark>ha</mark>dap Ancaman dari Luar

satu Sebagai salah negara kepulauan terbesar di dunia, Ind<mark>on</mark>esia memiliki 17.508 pulau ((UU No.6/1996). Dari total pulau tersebut, hanya 33 pulau yang tergolong sebagai pulau besar yang luasnya lebih dari 2.000 km2, sementara sisanya tergolong sebagai pulau-pulau kecil. Bahkan 111 diantaranya ditetapkan sebagai Pulau-Pulau Kecil terluar (PPKT)/(Keppres No.6/2017). 111 PPKT tersebut memiliki arti strategis bagi Indonesia, karena menjadi

titik dasar penentuan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) untuk mementukan luas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan amanah Pasal 47 United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Forbes, 2014). 111 PPKT tersebut berbatasan dengan 10 wilayah negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Selain peran strategis sebagai titik dasar penentuan luas wilayah Indonesia, 111 PPKT juga menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan negara,

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Letak 111 PPKT yang dekat dengan wilayah negara tetangga dan perairan internasional berkonsekuensi pada besarnya potensi ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat PPKT. Dalam konteks ekonomi, nelayan kecil harus bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan besar, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini membuat nelayan pulau kecil perbatasan kalah bersaing dan hanya mendapatkan ikan-ikan di sekitar pulau (Alami, 2015). Dalam konteks





politik-keamanan, masyarakat PPKT juga menghadapi ancaman terkait konflik di wilayah negara tetangga, seperti konflik Marawi dan Sulu, Filipina Selatan yang dekat dengan pulau Marore, Miangas, dan Kawio di Sulawesi Utara (Zuhri, 2016). Jika ketegangan meningkat dan konflik kembali pecah, masyarakat pulau-pulau kecil terluar di sekitar perairan yang pertama kali dapat menerima dampaknya. Kondisi di atas menggambarkan kerentanan (vulnerability) masyarakat PPKT.

Dalam rangka mengatasi masalah diatas, pemerintah Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala. Pertama, pemerintah tidak dapat perbatasan menutup kawasan dari dunia luar, karena fenomena globalisasi sudah menjangkau kawasan perbatasan Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk dapat mengatasi semua persoalan di atas secara mandiri (Raharjo, 2018). Oleh karena itu, masyarakat PPKT perlu diberdayakan untuk dapat melakukan bela negara, dalam rangka membantu mengamankan wilayah

perbatasan Indonesia. Untuk dapat melakukan bela negara secara optimal, masyarakat PPKT perlu memiliki ketahanan sosial yang baik, baik dari sisi modal alam, fisik, manusia, ekonomi/finansial, sosial, dan kelembagaan/politik. Tanpa hadirnya modal-modal tersebut, masyarakat PPKT akan mudah untuk diajak bernegosiasi dengan iming-iming mendapatkan kepentingan pribadi. Misalnya dalam konteks kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak secara illegal. Masyarakat PPKT perlu memiliki modal ekonomi/finansial yang kuat agar tidak mudah disuap dalam praktik yang merugikan. Berdasarkan argumentasi di atas, tulisan ini akan membahas kondisi ketahanan sosial masyarakat PPKT sebagai modal dalam melaksanakan bela negara untuk menghadapi ancaman di perbatasan.

Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT

Ketahanan (resilience) dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi pada dasarnya adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat bertahan dari gangguan. Adapun yang dimaksud dengan ketahanan sosial adalah kemampuan kelompok atau masyarakat untuk dapat menahan gangguan dari luar atau perubahanperubahan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang dapat merubah tatanan masyarakat atau struktur sosial (Adger, 2000). Masyarakat memiliki suatu kemampuan untuk dapat mengantisipasi risiko, membatasi dampak, dan bangkit kembali dengan cepat dalam menghadapi suatu perubahan melalui berbagai cara agar tetap dapat bertahan hidup (survival), memiliki kemampuan beradaptasi, berevolusi, dan mengalami pertumbuhan (CARRI, 2013). Dengan demikian, ketahanan mencakup kemampuan menangani untuk faktor eksternal dan mengurangi kerentanan, dan utamanya adalah untuk meminimalkan kerugian dan dapat segera memulihkan kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat (Lisnyak&Sharipov, 2015).

Ketahanan memiliki tiga dimensi penting yaitu kapasitas dari masyarakat sebagai pelaku untuk dapat mengatasi segala permasalahan (coping capacities), kemampuan untuk dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri agar dapat menerima segala tantangan di masa mendatang (adaptive capacities), serta kemampuan untuk dapat menciptakan kelembagaan yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan dalam masa sekarang mendatang (transformative capacities) (Keck&Sakdapolrak, 2013). Dengan kemampuannya tersebut, masyarakat dapat menghindari konflik dan mengelola konflik, serta merubah berbagai ancaman yang ada menjadi suatu peluang yang menguntungkan. Oleh karena itu ketahanan sosial tidak hanya merupakan kemampuan untuk bertahan, tetapi kemampuan untuk

secepatnya kembali kepada keadaan semula bahkan mungkin menciptakan keadaan yang lebih baik (Raharjo, 2018).

Untuk mengukur Ketahanan Sosial, salah satu pendekatan yang digunakan Livelihood adalah Sustainable Approach. Model ini mengukur ketahanan sosial berdasarkan aset yang dimilikinya, yang meliputi lima jenis, yaitu 1) modal alam (lingkungan), seperti tanah, air, kehidupan liar, biodiversitas, dan sumber daya lingkungan; 2) modal fisik, yang meliputi infrastruktur dasar (air, sanitasi, energi, transportasi, perumahan, dan komunikasi), dan alat-alat produksi; 3) modal manusia, yang meliputi kesehatan,

pengetahuan, keahlian, informasi, dan kemampuan untuk bekerja; 4) modal sosial berupa hubungan saling percaya, keanggotaan dalam sebuah kelompok, jaringan, akses terhadap lembaga yang yang lebih luas, dan lain-lain; 5) modal keuangan, meliputi pendapatan rutin/dana pensiun, tabungan, dan suplai kredit (Majale, 2001). Selain lima modal di atas, McLeod (2001) menambahkan modal/aset pengetahuan kelembagaan dan modal politik.

Untuk modal alam, sebagain masyarakat PPKT, seperti di Pulau Marore yang berbatasan dengan Filipina, hidup dalam lingkungan geografis dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Pada bulan-bulan



dari Agustus-Februari, gelombang tinggi menjadi fitur utama yang menghambat pelayaran dan penangkapan ikan. Kondisi tanah pulau kecil yang mereka tempati juga biasanya berupa tanah yang berbatu dan berpasir, sehingga kurang potensial untuk pertanian dan perkebunan. Namun, wilayah mereka dianugerahi dengan potensi ikan yang melimpah, yaitu berada di Wilayah Pengelolan Perikanan 716 dengan potensi 255.430 ton (KKP, 2014). Contoh PPKT lainnya, Pulau Sebatik yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, masyarakat di sana memiliki keterbatasan air bersih sehingga harus mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Tetapi mereka juga

dikaruniai tanah yang cocok untuk perkebunan pisang, sawit, dan kelapa.

Untuk modal fisik, masyarakat di sebagian PPKT saat ini sudah dapat berbagai infrastuktur menikmati dasar seperti pelabuhan dan PLTD/ PLTS. Mereka juga memiliki perahu untuk menangkap ikan maupun untuk transportasi, baik yang diperoleh secara pribadi maupun bantuan dari pemerintah. Sementara sebagian lagi masih belum dapat menikmati akses listrik PLN, seperti penduduk Pulau Kawio dan Matutuang di perbatasan Sulawesi Utara. Padahal akses listrik penting bagi nelayan menyimpan untuk ikan hasil tangkapan nelayan. Untuk daerah yang lebih ramai, seperti Pulau Sebatik, ada kapal motor yang melayani rute Sebatik ke Tarakan. Ada pula kapal-kapal cepat milik warga yang melayani rute Sebatik ke Nunukan. Adapun untuk infrastruktur darat, sebagian besar jalan sudah beraspal, walaupun di beberapa titik kondisinya memprihatinkan akibat jalan longsor yang belum diperbaiki. Untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terdapat fasilitas sekolah dari SD sampai SMA serta puskesmas posyandu di kecamatankecamatan pulau ini. Namun demikian, belum tersedia rumah sakit untuk rawat inap. Selama ini, warga yang butuh dirujuk harus menyeberang ke Nunukan yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak.

Untuk modal (sumber daya) manusia, Indeks Pembangunan Manusia masyarakat di beberapa PPKT cenderung lebih rendah dibanding rata-rata provinsi induk dan rata-rata nasional. Misalnya, IPM masyarakat PPKT di Kepulauan Sangihe pada tahun 2014 adalah 66,82, lebih rendah dibanding IPM rata-rata

Sulawesi Utara yang mencapai 69,96. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 15 ke atas yang hanya lulusan SD (52%) (BPS, 2015). Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi di Pulau Sebatik, di mana warganya yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak hanya lulusan SD (37,52%) (BPS, 2015).

Untuk modal ekonomi, masyarakat PPKT juga masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat pendapatan yang rendah. Di Pulau Marore misalnya, penduduk yang bekerja pada tahun 2014 hanya 44,17% (BPS, 2015). Pada kasus PPKT yang lain, yaitu di Sebatik, pendapatan mayoritas masyarakat yang bekerja sektor pertanian (termasuk perikanan) hanya Rp18.705.300 perkapita/pertahun atau Rp1.558.775 perkapita/perbulan pada 2014 (BPS, 2015). Angka ini lebih kecil dari rata-rata kebutuhan hidup layak di tingkat kabupaten induknya (Nunukan) yaitu sebesar Rp2.189.365 (BPS, 2015).

Untuk modal sosial, sebagian masyarakat PPKT memiliki hubungan sosial yang baik dengan warga negara tetangga. Misal di perbatasan Indonesia-Filipina, banyak warga yang berasal dari Marore berinteraksi dengan warga Sarangani-Filipina. Mereka saling berkomunikasi dan berkunjung karena memiliki garis kekerabatan. Demikian pula dengan Pulau Sebatik, mereka warga sudah sejak lama berinteraksi dengan masyarakat Tawau. Selain karena kedekatan geografis, ikatan kekerabatan juga menjadi pendorong interaksi tersebut.

Untuk modal politik, sebagian besar PPKT sudah memiliki satuan tugas pengamanan perbatasan



(satgas pamtas) TNI AD maupun Pos AL. Namun demikian, jumlah personil yang terbatas dan kurangnya sarana pengamanan operasi membuat wilayah perbatasan menjadi kurang optimal. Padahal, sebagian PPKT dekat dengan secara geografis wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran kedaulatan maupun kejahatan nontradisional seperti penyelundupan narkoba, perompakan, dan perdagangan orang.

Penjelasan enam modal di atas menunjukkan bahwa masyarakat PPKT memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam konteks ketahanan sosial. Kelebihan-kelebihan tersebut perlu dioptimalkan sebagai modal masyarakat PPKT melaksanakan bela negara. Adapun unsur kekurangan perlu diperbaiki agar dapat mendukung upaya bela negara tersebut.

Ketahanan Sosial sebagai Modal Bela Negara

Sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (3), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara dan Pasal 30 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (suhariyanto, 2017). Upaya bela negara, menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002, didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan





negara. Upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi (Pasal 9(2) UU No.3/2002). Sejatinya, bela negara juga merupakan perwujudan dari nasionalisme yang dimiliki oleh warga Indonesia, yaitu keterikatan terhadap kelompok nasional yang terdiri atas perasaan serta kebanggaan terhadap negaranya Pamungkas, 2015).

Dalam penyelenggaraan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, masyarakat PPKT dapat mewujudkan bela negaranya sesuai dengan profesi mereka yang banyak menjadi nelayan. Untuk modal alam berupa melimpahnya sumber daya ikan, bela negara dapat dilakukan dengan tidak menjual ikan hasil tangkapan ke negara sebelah. Nelayan PPKT dapat membantu mencegah praktik transshipment yang merugikan potensi pendapatan negara.

Untuk modal fisik berupa kepemilikan perahu, masyarakat nelayan PPKT dapat mempraktikkan bela negara dengan membantu melakukan pengawasan perairan Indonesia terhadap masuknya kapalkapal asing illegal. Hal ini sudah dipraktikkan oleh nelayan di Pulau Laut, Natuna yang berbatasan dengan Vietnam di laut China Selatan, mereka sering membantu tugas Pos AL dengan melaporkan kapal-kapal asing yang mereka temukan beroperasi secara ilegal di perairan Natuna.

Untuk modal (sumber daya) bela negara dapat manusia, diwujudkan peningkatan melalui PPKT keikutsertaan masyarakat dalam proses pendidikan, baik formal maupun informal. Masyarakat di Pulau Kawio misalnya, mereka semangat menyekolahkan anaknya ke Pulau Marore untuk tingkat SMP dan SMA karena di pulau mereka hanya ada sekolah SD. Karena berbeda pulau, orang tua mereka membuatkan pondok-pondok dari kayu untuk tempat tinggal anak-anak mereka di dekat gedung sekolah. Semangat ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat PPKT semakin sadar pentingnya pendidikan. Mereka juga tetap memilih untuk bersekolah di institusi pendidikan milik dalam

negeri, sehingga tetap mendapatkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Untuk modal finansial/ekonomi, masyarakat PPKT dapat mewujudkan bela negara dengan tidak menjual komoditas hasil ekstraksi sumber daya di perbatasan ke negara tetangga secara illegal, atau tidak menjual komoditas dalam bentuk mentah. Masyarakat perbatasan dapat mengolah komoditas tersebut untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum dijual/diekspor ke negara tetangga. Saluran untuk jual beli secara tradisional yang legal sudah difasilitasi oleh negara dengan Border Trade Agreement antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste.

Untuk modal sosial berupa kuatnya hubungan sosial dengan masyarakat negara tetangga, masyarakat PPKT perlu menggunakan modal ini untuk meningkatkan persaudaraan dan saling pengertian antar bangsa.

Untuk modal politik, masyarakat dapat membantu nelayan PPKT pengamanan Indonesia. perairan baik Laut Teritorial maupun ZEE, dari berbagai pelanggaran kedaulatan maupun praktik nontradisional lintas kejahatan Perdagangan negara. narkoba, penyelundupan migran, penjualan BBM, merupakan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di perairan PPKT. Masyarakat PPKT dapat berperan mengatasi hal tersebut secara pasif dengan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut maupun secara aktif dengan membantu memberikan informasi yang berguna kepada petugas pengamanan dari TNI, Polairud, Bakamla, dan instansi lainnya.



Dengan modal modal ketahanan sosial yang dimiliki sekarang, masyarakat PPKT dapat mempraktikkan wujud-wujud bela negara di atas. Namun demikian, bukan berarti modal-modal tersebut sudah cukup. Perlu ada kebijakan peningkatan modal-modal ketahanan sosial, terutama yang masih lemah seperti modal fisik, manusia, dan finansial/ekonomi. Hal ini untuk mendukung optimalisasi masyarakat PPKT dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di wilayah perbatasan.***

Daftar Pustaka

- Adger, Neil W. 2000. "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" Progress in Human Geography Vol. 24 No. 3: 347-364.
- Alami, Athiqah Nur dkk. 2015. Gender-Based Natural Resource Management In Indonesian Marine Borders. Yogyakarta: Pintal.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Nunukan dalam Angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kepulauan Sangihe dalam Angka 2015. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Community & Regional Resilience Institute. 2013. Definitions of Community Resilience: An Analysis (A CARRI Report). Diakses pada 12 Oktober 2018 dari http://www.resilientus.org/wp-content/ uploads/2013/08/definitions-ofcommunity-resilience.pdf.
- Forbes, Vivian Louis. 2014. Indonesia's Delimited Maritime Boundaries. Heidelberg: Springer.
- Keck, Markus & Patrick Sakdapolrak. 2013.
 "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward", Erdkunde Vol. 67 No. 1: 5-19.
- · Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.



2014. Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 2005–2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP RI.

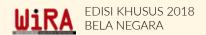
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Pulau Kecil Terluar.
- Lisnyak, Sergey & Ilkom Sharipov. 2015.
 "Exploring the Formal and Informal
 Institutions as a Key Tool for Enhancing
 Economic Resilience" CES Working Papers,
 Vol. 7(4), 2015, hlm. 891–900.
- Majale, Mike. 2001. "Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading." Dalam International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading, Bourton-On-Dunsmore, 17-18 Mei 2001.
- McLeod, R. 2001. "The Impact of Regulations and Procedures on the Livelihoods and Asset Base of the Urban Poor: A Financial Perspective." Dalam International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading, Bourton-on-Dunsmore, 17-18 Mei 2001.



- Pamungkas, Cahyo. 2015. "Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun." Masyarakat Indonesia, Vol. 41 No. 2: 147-162.
- Raharjo, Sandy N. I. (ed.). 2018. Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Studi Kepulauan Marore dan Sebatik. Jakarta: LIPI Press.
- Raharjo, Sandy N.I. dkk. 2012.
 "Pemberdayaan Nelayan Lokal dalam Mengatasi Pencurian Ikan di Kawasan Perbatasan Laut Natuna." Dalam Prosiding Nasional Riset dan Kebijakan Sosial

- Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan Ke-IV Imfisern. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Suhariyanto, Bambang Eko. 2017. "Bela Negara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." WIRA: Media Informasi kementerian pertahanan, Edisi Khusus 2017: 22-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Zuhri, Muhammad. 2016, "Begini Cerita Kapal TNI AL dicueki Coast Guard China di Laut Natuna." Diiakses pada 12 Oktober 2018 dari http://batamnews.co.id/berita-11906-begini-cerita-kapal-tni-al-dicueki-coast-guard-china-di-laut-natuna.html.



BELA NEGARA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARITIM

Oleh:

Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH.

Dosen Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia

Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah. Sumber daya kelautan merupakan bagian dari kepentingan nasional di laut, dan juga bagian dari aset penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia memiliki banyak wilayah pesisir yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia, baik wilayah yang dibatasi oleh laut terbuka maupun laut tertutup. Wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, yang memiliki batas baik ke arah darat maupun ke arah laut. Wilayah Indonesia juga berbatasan laut dengan 10 negara tetangga, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Australia.

Wilayah pesisir sangat penting dan perlu dikelola serta dijaga kelestariannya. Pesisir merupakan salah satu kawasan tempat tinggal paling penting bagi manusia (masyarakat maritim) dengan segala macam aktivitasnya. Panjang pesisir di Indonesia kurang lebih 81.000 km, merupakan pesisir terpanjang di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.504 buah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kawasan pesisir.





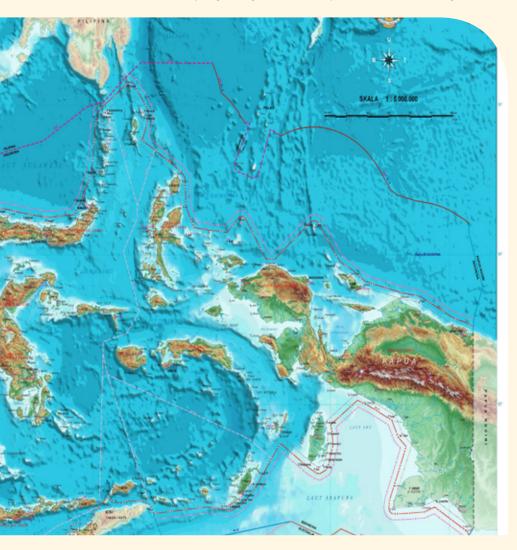
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang ditunjang dengan dua per tiga wilayah yang terdiri dari perairan, memunculkan beberapa keuntungan dan juga permasalahan ancaman keamanan maritim yang harus diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia.

Potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui Sea Lanes of Communication (SLOC) serta Sea Lines of Oil Trade (SLOT). Laut Indonesia memiliki arti yang sangat

penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi.

Karena karakteristik Indonesia khas itulah maka sistem pertahanan negara harus diatur dengan Undangbaik. Dalam Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada Pasal 2 dinyatakan pula bahwa sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan total, terpadu, secara terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia.

Konsepsi pertahanan menurut Undang-Undang Pertahanan merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan dalam menumbuhkan banasa mengembangkan nilai-nilai dan nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sebagai penjabaran dari konsepsi pertahanan ke dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, maka Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyebutkan bahwa tugas TNI dibagi menjadi dua yaitu tugas pada OMP (Operasi Militer Perang) dan pada OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, tugas TNI Angkatan Laut salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut yang diarahkan untuk menggali dan memberdayakan potensi masyarakat maritim menjadi potensi pertahanan negara di laut serta menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung rencana pembangunan nasional melalui kegiatan Bhakti TNI Angkatan Laut.



Ancaman Keamanan Maritim

Ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dipahami atau didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian peristiwa yang dapat memberikan ancaman secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat di suatu negara. Ancaman merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengganggu keamanan dengan melakukan membahayakan. tindakan vana Ancaman keamanan maritim dapat dibagi dua, yaitu ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Dalam konteks keamanan maritim, ancaman tradisional sering diartikan sebagai isu perselisihan batas wilayah laut yang dapat menyebabkan konflik angkatan bersenjata (militer) di laut. Sementara non-tradisional ancaman konteks keamanan maritim adalah ancaman yang datang dari non-state

actor atau pelakunya bukan dari institusi negara, melainkan kelompokkelompok yang melakukan kejahatan di laut.

Ancaman-ancaman keamanan maritim jenisnya beragam, antara perompakan, pembajakan terorisme, penyelundupan kapal, narkotika, kayu, dan barang-barang ilegal, perdagangan manusia lewat laut, illegal fishing, dan kejahatan lainnya. Sekitar 75% komoditas yang diperdagangkan di dunia dikirimkan melalui wilayah laut Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki potensi produk lestari perikanan laut mencapai 9,93 juta ton pada tahun 2015. Tidak heran jika wilayah laut Indonesia menjadi akan ancaman-ancaman kejahatan yang terjadi di laut.

Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States, and Fear* menyatakan bahwa ancaman dan kerentanan adalah dua hal yang salina berkaitan. ketika sebuah negara lalai dalam memprediksi atau memperhitungkan kerentanannya pada sebuah ancaman maka akan berdampak pada terganggunya keamanan nasional negara tersebut. ancaman-ancaman tersebut Agar tidak mengganggu keamanan khususnya keamanan nasional, maritim di perairan yurisdiksi nasional, maka diperlukan sinergitas aparat-aparat keamanan maritim dan masyarakat maritim untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan yurisdiksi nasional.

Bela Negara Aspek Maritim

Pemikir Teori Kekuatan Maritim Sir Walter Raleigh (1554-1618) mengatakan, "Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Sedangkan Alfred T. Mahan (1840-1914) mengatakan, "Laut untuk kehidupan, SDA banyak





terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya." Dia juga mengatakan bahwa perlu memperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan Negara. Dari pernyataan ke-2 tokoh ini menyiratkan pentingnya bagi negara yang memiliki laut yang sangat luas seperti Indonesia untuk menguasai, mempertahankan menjaga dan wilayah lautnya.

Pertahanan Negara merupakan untuk mempertahankan upaya kedaulatan nasional, integritas teritorial dan keamanan seluruh negara bangsa dari ancaman dan terhadap gangguan keutuhan bangsa. Sifat pertahanan negara adalah segala upaya sebagai realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan kita sendiri. Kewajiban bela negara bagi warga negara ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan ayat 3. Pertahanan nasional dilakukan oleh

pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional adalah pasukan gabungan (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, usaha penyelenggara pertahanan negara harus mengacu pada hakikat dan tujuan tersebut. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Sedangkan sistem pertahanan negara dilaksanakan dengan cara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama adalah sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang siap dan dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama, mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di bidang maritim. Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim merupakan upaya dalam rangka membina dan mengembangkan kondisi segenap potensi nasional yang mempunyai kaitan/ pengaruh di bidang maritim, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber buatan termasuk daya sarana dan prasarananya agar mampu melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan di bidang maritim.

Masyarakat Maritim sebagai Komponen Pendukung Bela Negara

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan bertujuan membantu



menyiapkan pemerintah potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan Menyelenggarakan semesta. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (maritim) adalah segala usaha/kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi maritim menjadi kemampuan dan kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan negara di laut.

Masyarakat maritim dalam

tulisan ini adalah masyarakat yang melakukan segala aktifitas pelayaran, perniagaan, perdagangan, kegiatan, pekerjaan dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kelautan atau kemaritiman. Dalam konteks sistem pertahanan negara, masyarakat maritim dibagi menjadi Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung bela negara aspek maritim. Komponen Utama terdiri dari kekuatan TNI Angkatan Laut, Komponen Cadangan terdiri dari unsur-unsur pemerintah yang bertugas di laut, seperti POLRI/ Kepolisian Direktorat Perairan; Kementerian Perhubungan/Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai dan Bakamla. Sedangkan Komponen Pendukung pertahanan di laut terdiri dari nelayan dan masyarakat maritim lainnya.

Saat ini terdapat 6 institusi penting yang berwenang melakukan tugastugas pertahanan dan keamanan negara di laut, yaitu TNI AL, Bakamla, Bea dan Cukai, PSDKP-KKP, Polairud, dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai/KPLP, dengan daerah operasi mulai dari garis pangkal hingga laut lepas di atas 200 mil. Dari ke 6 institusi tersebut terdapat 5 institusi dapat dikatakan sebagai komponen cadangan dalan sistem pertahanan Indonesia, yang mana dapat menggandakan kekuatan TNI AL dalam masa perang. 6 institusi ini memiliki kapal sebagai kemampuan utama dalam menjaga laut Indonesia, TNI AL memiliki 146 kapal, Polair 22 kapal siaga dan 52 kapal tidak siaga, Kemenhub 138 kapal, KKP 27 kapal pengawas dan 89 speedboat, Bea cukai 179 kapal terdiri dari FPB 60 m dan speedboat, dan Bakamla 6 kapal 48 m, 10 kapal 12 m, dan 8 RIB. Dengan jumlah kapal yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut dinilai masih sangat jauh dari cukup untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas.

Penggunaan kekuatan sipil sebagai komponen pendukung militer di laut sudah ada sejak abad pertengahan dengan memanfaatkan kearifan lokal, mereka dikenal sebagai perompak dan korsario. Dalam konsep sistem pertahanan semesta Indonesia juga melibatkan Komponen Pendukung, terdiri dari nelayan yang masyarakat maritim lainnya, yang dilatih untuk digunakan membantu sebagai kepanjangan mata dan telinga aparat pertahanan dan keamanan di laut. Pembinaan kepada nelayan dan masyarakat maritim ini dilakukan oleh masing-masing institusi, seperti pembinaan desa pesisir (Bindesir) yang dilakukan oleh aparat TNI AL yang bertugas di daerah, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dilakukan yang oleh aparat PSDKP-KKP dalam hal membantu pengawasan perikanan, dan pembinaan nelayan oleh aparat kepolisian (Badan Narkotika Nasional Bina Nelayan), yang merekrut nelayan sebagai informan terhadap kegiatan kamtibmas.

Pembahasan

Perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang sangat luas, berada di titik silang dunia, dan berbatasan langsung dengan 10 negara sangat rawan terhadap segala ancaman keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim yang berupa perompakan, pembajakan kapal, terorisme, penyelundupan narkotika, kayu, dan barang-barang ilegal, perdagangan manusia lewat laut, illegal fishing, dan kejahatan lainnya, dapat masuk ke Indonesia melalui laut terbuka maupun laut tertutup yang berbatasan dengan negara tetangga.

Luasnya perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia memerlukan pengawasan yang ketat terhadap segala ancaman keamanan maritim baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. TNI AL sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan di laut dengan jumlah unsur patroli yang terbatas tentunya tidak mampu mengamankan seluruh

perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Dalam hal keamanan maritim, unsurunsur yang tergabung dalam Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun belum mampu untuk mengamankan seluruh bagian perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Dalam menjaga keamanan dan mempertahankan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, diperlukan keikutsertaan semua komponen masyarakat maritim, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan ayat 3, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 1 dan pasal 2. Untuk itu diperlukan keikutsertaan para nelayan dan masyarakat maritim dalam upaya bela negara untuk turut serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di laut.

Dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan perairan



yurisdiksi nasional Indonesia, zonazona laut Indonesia telah terbagi habis oleh gelar patroli dari unsur-unsur TNI AL maupun oleh unsur-unsur keamanan laut yang tergabung dalam Badan Keamanan Laut. Di perairan negara yang terdiri dari perairan kepulauan, pedalaman, perairan hingga laut teritorial 12 Nm dari garis pantai telah diamankan oleh unsur-unsur patroli TNI AL, Polairud, KPLP, Bea dan Cukai, PSDKP-KKP, dan Bakamla, bahkan Bea dan Cukai bisa patroli hingga zona tambahan 24 Nm. Di perairan yurisdiksi Indonesia ZEEI hingga 200 Nm diamankan oleh unsur-unsur TNI AL dan PSDKP-KKP, dan di landas kontinen hingga 350 Nm hanya diamankan oleh unsurunsur TNI AL.

Peranan nelayan dan masyarakat maritim lainnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengamankan mempertahankan dan wilayah perairan nasional yurisdiksi nasional, sebagian telah dimanfaatkan sebagai komponen pendukung bela negara oleh TNI AL dalam program pembinaan desa pesisir, dimanfaatkan oleh PSDKP-KKP dalam kelompok masyarakat pengawasan perikanan, dan juga dimanfaatkan oleh Polairud

dalam program BNN bina nelayan. Pembinaan ini belum menyeluruh pada nelayan dan masyarakat maritim, namun masih bersifat sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan belum terpadu dalam pembinaan nelayan dan masyarakat maritim sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

Dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan laut (dawilhanla) yang meliputi segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi maritim untuk menjadi kemampuan dan kekuatan kewilayahan yang tangguh mendukung kepentingan guna pertahanan negara di laut, diperlukan keterpaduan pembinaan baik pembinaan terhadap komponen cadangan bela negara, maupun pembinaan terhadap komponen pendukung bela negara. Keberhasilan melaksanakan dawilhanla ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola Potensi Maritim Nasional menjadi kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan pertahanan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Operasi

Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk itu pola pembinaan Dawilhanla disesuaikan dengan tingkat kematangan/kesiapan dari potensi maritim nasional yang dimiliki.

Penutup

Pertahanan Negara di laut merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat menyeluruh, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat terutama di wilayah maritim. Pembangunan pertahanan Negara di laut menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Pertahanan Negara di laut dapat terjamin bila melibatkan seluruh komponen kekuatan dan pertahanan dan keamanan di laut, yang meliputi komponen utama TNI AL, komponen cadangan yang meliputi seluruh unsur-unsur keamanan laut yang tergabung dalam Bakamla, termasuk komponen pendukung yang terdiri dari para nelayan dan masyarakat maritim lainnya yang sehari-hari melaksanakan tugas dan kegiatan serta mencari nafkah di laut.

Pemberdayaan wilayah pertahanan yang merupakan wadah pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara di laut terus melakukan pembinaan terhadap seluruh komponen pertahanan di laut, termasuk pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional lainnya untuk digunakan dalam kepentingan pertahanan dan keamanan di laut.





Pembinaan yang telah dilakukan oleh unsur-unsur TNI AL dalam pembinaan desa pesisir, pembinaan masyarakat pengawas perikanan oleh PSDKP-KKP dan pembinaan nelayan oleh Kepolisian dapat disinergikan, sehingga nelayan dan masyarakat maritim yang melakukan aktifitas di laut dapat diberdayakan dan dioptimalkan pemanfaatannya sebagai bagian dari komponen pendukung bela negara di laut. ***

Daftar Pustaka

- Allen, W. R, dan Conway, T., Naval Operation Concept: Implementing The Maritime Strategy, 2010.
- Anwar, S., Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan Agustus 2013. Volume 3, Nomor 2. Universitas Pertahanan Indonesia, 2013.
- Buzan, B., People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era', edisi ke dua, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1991.

- ----- (et.al): A New Freme Work foe Analisis (London Lynne Rienne,1998).
- Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak)
 TNI AL tentang Pemberdayaan Wilayah
 Pertahanan
- Jones, S., The Strategic Logic of Militia.
 Working Paper. RAND, 2012.
- Nainggolan, P., Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis. Jakarta: P3DI, 2015.
- Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Rachman, C., Concepts of Maritime Security:
 A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand.

 New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009.
- Till, G., Sea power, A guide for the Twenty-First Century. Second edition. Routledge, New York, 2009.

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.



PERAN UNHAN SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA DALAM MENCETAK KADER INTELEKTUAL BELA NEGARA

Oleh:

Kolonel. Inf. Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M Kepala Pusat Penelitian Bela Negara dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pertahanan Indonesia

Setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka dan menghadapi perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis, Indonesia memandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang mampu mengkaji secara strategis isu-isu pertahanan. Proses pendirian Unhan berawal Instruksi Presiden RI saat itu kepada Kepala Staf TNI AD pada akhir tahun 2005, untuk mengkaji pendirian sebuah lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi, yang mempelajari isu-isu strategis berhubungan dengan masalah pertahanan.

Sebagai Kasad saat itu, Jendral TNI Djoko Santoso, memberikan direktif kepada Komandan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) Mayjen TNI Syarifudin Tippe, agar melakukan pengkajian atas instruksi Presiden tersebut. Setelah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) Kemhan RI pada awal tahun 2008, Mayor Jenderal TNI Syarifudin Tippe, S.I.P, M.Sc menindaklanjuti direktif Kasad tersebut dan menyampaikan konsep pembentukan lembaga pendidikan pertahanan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prof Dr Juwono Sudarso.

Pada tanggal 9 april 2008, Menhan RI mengeluarkan surat keputusan Nomor: SKEP/234/M/IV/2008 tentang Tim Kerja Pendirian Lembaga Pasca Sarjana Pertahanan. Pada awal tahun 2009 anggota tim kerja yang menyiapkan regulasi dan pengisian personel terkait tentang Universitas Pertahanan (Unhan). diresmikan pada tanggal 11 Maret 2009, dilanjutkan dengan pengisian personel Unhan, maka satu persatu regulasi tersebut dapat diselesaikan oleh pejabat di lingkungan Unhan bersama perjanjian Kemhan RI dan Kemendikbud RI. Regulasi pertama yang disahkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Universitas Pertahanan sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah pada tanggal 12 Juni 2010. Namun Peraturan pemerintah

ini dibatalkan, karena dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagai penggantinya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Demikian juga regulasi lainnya secara bertahap satu demi satu dapat diselesaikan hingga tahun 2014.

Sebagaimana universitas lainnya, Unhan juga memiliki Visi dan misi sebagai landasan dari arah tujuan. Visinya "Menjadi Universitas Pertahanan berstandar kelas dunia (World Class University) dengan berbasis riset yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan", dan misinya berikut Mendidik sebagai (1) calon pemimpin militer dan sipil yang profesional, inovatif, serta memiliki nilai-nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademis melalui program pendidikan sarjana; pasca Menggembangkan ilmu pengetahuan sebagai interdisipliner antar berbagai keilmuan guna meningkatkan kemampuan pertahanan sistem negara; Menyelenggarakan (3) sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu; (4) Menyelenggarakan dengan pendekatan manajemen partisipatif dan kolegial didukung administrasi pendidikan tinggi berbasis mutu yang efisien dan akuntabel; Melaksanakan kerja dengan dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri guna peningkatan dan pengembangan keilmuan untuk memperkuat pertahanan negara; (6) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) berdaya saing dalam bidang pertahanan dan bela negara; serta (7) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan

untuk mendukung pembelajaran inovatif dan modern.

Berbeda dengan univeritas lainnya, dalam Unhan disiapkan pemerintah guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang semakin komplek mencerdaskan kehidupan serta bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena pada era globalisasi ini pola ancaman bagi setiap negara telah bergeser dari ancaman tradisional menjadi ancaman non tradisional yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mengantisipasi kondisi tersebut dibutuhkan lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tetap terjaganya kebutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Negara





Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan bangsa yang dilandasi oleh ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sebagai bangsa yang manjemuk atau pluralisme.

landasan tersebut Dengan serta visi-misi Unhan, maka Unhan membuat konsep sebuah materi pendidikan dan pelatihan bela negara sebelum masuk kedalam pembelajaran inti dari masing-masing program studi. Oleh karena itu Unhan sebagai salah satu perguruan tinggi pemerintah telah mendeklarasikan sebagai Kampus Bela Negara, dengan menuangkan nilai-nilai bela negara ke dalam kurikulum pendidikan yang selama melaksanakan dipelajari pendidikan di Unhan. Sehingga begitu para mahasiswa lulus dari mereka mendapatkan Unhan. tanggung jawab sebagai "Kader Intelektual Bela Negara". Tanggung jawab ini merupakan pintu gerbang memasuki dunia pengabdian yang sebenarnya serta melanjutkan proses pengembangan diri yang optimal bagi masing-masing individu maupun bagi organisasi dan lembaga dimanapun mereka bertugas.

Hal ini sesuai dengan harapan Kemhan RI melalui Unhan yang menekankan para alumni tidak hanya mampu berfikir dan bertindak sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh, tetapi juga diharapkan memiliki karakter dan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Nilai-nilai tersebut yaitu yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kesadaran yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Dengan demikian Unhan sebagai kampus Bela Negara telah memposisikan eksistensinya sebagai satu-satunya perquruan tinggi di Indonesia yang memfokuskan diri pada studi Ilmu Pertahanan dan bela negara untuk menyiapkan generasi pemimpin bangsa menjadi garda utama pertahanan bangsa yang maju dan modern.

lingkup kegiatan Ruang Unhan adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ilmu pertahanan dan bela negara untuk memberdayakan mahasiswa dengan menggembangkan isi pembelajaran dan relevasinya dengan kebutuhan sistem pertahanan negara melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Tridharma perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 1 ayat 9 bahwa melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pertahanan, yang hasilnya

di publikasikan dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pertahanan bidana negara; melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian dalam bidang pertahanan negara; menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan profesi adalah program diploma, sarjana dan pasca sarjana.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan Unhan bertujuan untuk membantu masyarakat agar mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Peran mahasiswa dalam hal ini sangat diperlukan sekali, karena mahasiswa nantinya akan kembali ke masyarakat. Jika mahasiswa sejak awal sudah melakukan hal

ini, nantinya mahasiswa tidak akan merasa asing lagi dengan keadaan masyarakat sekitar, karena merasa perlu menyesuaikan diri kembali.

Penelitian merupakan bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan diperoleh semasa tinggi pendidikan di perguruan terutama di Unhan. Dengan penelitian (KKDN/KKLN), para mahasiswa bertambah akan cakap dalam disiplin ilmunya, serta akan menjadi semakin paham. Dengan penelitian juga mahasiswa nantinya juga akan menemukan berbagai hal yang baru, sehingga dapat memperkaya penguasaan ilmunya. Hasil penelitian itu pula, nantinya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmunya.

Selain pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Unhan melaksanakan kegiatan Parade Cinta Tanah Air dan "Unhan Mengajar" bertujuan untuk menunjang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan Warga Negara Indonesia yang memahami dan menyadari hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara. Pada era reformasi sekarang ini, bangsa Indonesia sangat memerlukan suatu terobosan yang mampu menyatukan emosi kebangsaan menjadi emosi kolektif dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di segala bidang mempertahankan dengan tetap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kegiatan Parade Cinta Tanah Air merupakan sebuah gagasan sosialisasi yang menyampaikan pesan pembentukan karakter kepada anak muda Indonesia yang diperuntukan bagi mahasiswa/mahasiswi dan pelajar SLTA/sederajat di seluruh Indonesia, berupa lomba menulis artikel dan diskusi. Para Parade Cinta Tanah Air tidak hanya berdebat, berekspresi, berargumentasi mengenai bela negara dan cinta tanah



air, tapi juga dapat mengaplikasikan pemikiran-pemikiran dalam tindakan sehari-hari. Sikap bela negara dan cinta tanah air merupakan nilai karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dalam "Unhan mengajar" merupakan wadah yang diharapkan dapat menjadi pelopor bagi civitas akademika dalam dan pembangunan pengabdian negeri. Melalui pembelajaran kepada calon penerus bangsa. Mahasiswa Universitas Pertahanan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Unhan, khususnya anak usia sekolah.

Oleh karena itu kehadiran Unhan

sebagai Kampus Bela Negara diharapkan menjadi salah satu upaya atau jawaban terhadap dinamika perkembangan lingkungan global, regional maupun nasional yang sangat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas di kawasan. Harapan besar dipundak Unhan adalah untuk dapat menghasilkan lulusan sarjana program Magister dan Doktor baik yang bersifat sain maupun vokasi dengan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang pertahanan, studi keamanan dan isuisu strategis lainnya.

Para alumnus Unhan diharapkan akan mampu memberikan konstribusi berharga terhadap sistem pertahanan

dapat dipadukan negara yang kedalam berbagai bidang keilmuan (multidisipliner) yang dibutuhkan bagi kepentingan nasional Indonesia. Dengan adanya pembekalan para generasi muda baik dari kalangan sipil maupun militer terkait dengan ilmu pertahanan negara dan bela negara, Unhan diharapkan menjadi semacam melting point bagi hubungan sipilmiliter di Indonesia selain itu diharapkan menjadikan universitas yang berkelas dunia (world-class university) yang dibangun dengan pradigma think out of the box dan tidak dimulai dari nol (not starting from the scratch).

Di masa yang akan datang sumber





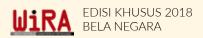


rekrutmen strata-1 bisa berasal dari lingkungan TNI dan berbagai alumnus perguruan tinggi.

Sejalan dengan cita-cita dan harapan tersebut, civitas akademika Unhan harus mempunyai semangat para pendahulu bangsa dan selalu menjunjung tinggi kebebasan akademik. Kebebasan akademik merupakan hak anggota civitas akademika untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat atau gagasan. Dalam suasana kebebasan akademik tersebut suasana kondusif senantiasa diciptakan untuk memungkinkan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfat bagi peningkatan kompetensi dan martabat profesi, sesuai norma dan kaidah keilmuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, kewibawaan dan nama baik institusi kemhan RI.

Kode etik yang selalu ditumbuhkembangkan di lingkungan civitas akademika adalah ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa pancasila dan taat kepada pemerintah RI yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbudi luhur, bersikap rendah hati, berdisiplin, siap melayani, bekerjasama dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi dan mengamalkan dengan patuh statute dan peraturan-peraturan pelaksanaanya yang berlaku di Unhan. Peka menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Almamater, masyarakat ilmiah dan profesi.***



SEMARAK PESTA OLAHRAGA, SEMANGAT BELA NEGARA!

Oleh:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han) Wakil Direktur Bidang II Institut Kesenian Jakarta

Pendahuluan

<mark>Se</mark>marak Pesta Olahraga Asia atau dikenal sebagai 18th Asian Games baru saja berlalu. Meskipun sec<mark>ar</mark>a resmi ajang olahraga ini diadakan di dua kota: Jakarta dan sebenarnya Palembang, namun pertandingan kegiatan berimbas pula penyelenggaraannya ke Jawa Barat, Lampung, dan Tangerang, bahkan demamnya menjalar hingga ke kota-kota lain. Beragam kisah pun mewarnai sepanjang acara yang berlangsung 18 Agustus hingga 2 September ini, sejak bulan-bulan terakhir menjelang penyelenggaraan hingga sesudah kegiatan berakhir, sehingga pembicaraan mengenai pesta olahraga seolah tidak kunjung usai.

Pembukaan *Asian Games* ke-18 kembali diselenggarakan di Jakarta, di Stadion Gelora Bung Karno, setelah 5 dekade berlalu . Kali ini, ada 45 negara Asia yang mengirimkan atletnya, meskipun hanya 37 negara yang

berhasil merebut medali. Apabila pada Asian Games ke-4 pada 1962 di Jakarta dulu terdapat kekhawatiran bercampurnya olahraga dengan kepentingan politik terkait perang dingin, pembebasan atas penjajahan dan gerakan Non-Blok , maka hal yang menarik di ajang Asian Games kali ini adalah pertunjukan atlet Korea Utara dan Korea Selatan berbaris bersama untuk pertama kalinya dalam ajang internasional di bawah satu Bendera Persatuan Korea walau barisan yang mengibarkan bendera



kedua negara tetap ada. Bahkan, sebuah medali emas untuk cabang olahraga perahu naga dimenangkan oleh tim Korea bersatu sehingga menjadi sejarah tersendiri dalam upaya perdamaian dan persatuan Korea Utara dan Korea Selatan. Pada ajang Asian Games 2018 ini, 6 rekor olahraga dunia, 18 Asia dan 86 Asian Games berhasil dilampaui. Hal yang tidak mengherankan mengingat Asian Games telah dianggap salah satu pesta olahraga yang diperhitungkan sebagai persiapan dan uji coba para atlet sebelum kemudian mereka bertanding di Olimpiade – pesta olahraga dunia yang akan diselenggarakan di Tokyo pada 2020. Semangat olimpiade citius-altius-fortius untuk menjadi yang tercepat, tertinggi, dan terkuat, termasuk semboyan datang-lihat-

CHRELAY

CHARGO ASIAN GAMIS 7913

menang sungguh terasa auranya dari pertandingan ke pertandingan.

Semarak Asian Games 2018

Asian Games 2018 sebagaimana perhelatan akbar lainnya mencatat sejumlah hal menarik baik positif maupun negatif. Keinginan untuk meraih medali kerap membuat para atlet menghalalkan segala cara termasuk doping. Kali ini, dijatuhkan kepada sanksi atlet gulat Turkmenistan dan membuat cabang olahraga ini masuk dalam pertimbangan apakah dipertandingkan lagi di masa depan. Pihak penyelenggara dan tuan rumah pun tidak luput mendapatkan sorotan tajam. Sejumlah kasus infrastruktur yang bermasalah baik di Jakarta maupun Palembang berkali-kali menjadi tajuk berita karena berbagai kekacauan dan ketidaksiapan yang ada, penanggulangan aroma tidak sedap yang dikeluarkan Kali Hitam yang terletak di sekitar Wisma Atlet, hingga kesulitan untuk memperoleh tiket pertandingan. Terlepas dari itu semua, upacara pembukaan *Asian* Games 2018 dianggap sebagai yang terbaik di dunia untuk acara olahraga besar. Hal yang tidak lepas dari dukungan tim kreatif yang diawaki Wishnutama sang Direktur Kreatif, Deny Malik dan Eko Supriyanto untuk koreografi, Adi MS dan Ronald Steven untuk penata musik, serta Rinaldy Yuniardi dan Dynand Fariz untuk kostum. Tim kreatif yang solid dan beranggotakan orang-orang terbaik di bidangnya ini mampu menampilkan keanekaragaman alam dan budaya yang ada di Indonesia, bahkan menara api abadi pun dinyalakan pada replika gunung berapi. Maskot *Asian Games* pun mewakili keberagaman sekaligus keunikan Indonesia karena diambil dari moto Bhinneka Tunggal Ika. Bhin-Bhin si burung cenderawasih, Atung si

rusa Bawean, dan Kaka si badak Jawa mewakili daerah Timur, Tengah, dan Barat Indonesia sekaligus strategi, kecepatan, dan kekuatan yang menjadi hal penting dalam olahraga. Semua maskot itu pun dirancang oleh anak bangsa yang tergabung di Feat Studio . Dalam hal ini, kolaborasi olahraga dengan industri kreatif adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan menunjang penyelenggaraan acara dan turut sebagai penentu kesuksesan. Kondisi semacam inilah yang perlu dirancang untuk terus ada agar terjadi sinergi yang menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi kreatif sekaligus berdampak pada keberlanjutan kegiatan olahraga itu sendiri.

Pembinaan Olahraga

Keikutsertaan Indonesia dalam pentas olahraga dunia bukanlah hal yang baru. Namun demikian, Asian Games 2018 membuat berbagai kepentingan pemangku menjadi lebih sadar betapa Indonesia jauh tertinggal dari China yang selama 10 tahun terakhir secara berturutturut menguasai perolehan medali. Ketertinggalan dari Jepang dan Korea pun juga terlihat apabila ditinjau dari kemasan strategi pertandingan yang sangat apik. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi yang diterapkan kontingen berbagai bangsa pun memiliki korelasi kuat dalam proses pendapatan medali. Oleh sebab itu, meskipun terjadi lompatan bagi Indonesia dalam perolehan medali, yaitu 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu dari 465 nomor yang diperebutkan, serta mampu berada di peringkat ke-4, tetap saja ketertinggalan di bidang pengelolaan atlet berdasarkan cabang olahraga dan pembinaan berbasis Olahraga menjadi hal yang patut diperhatikan berbagai pemangku

kepentingan dan pembuat keputusan terkait bidang olahraga. Walaupun tentu saja kita tidak bisa menafikan fakta bahwa pembinaan cabang olahraga beberapa tahun belakangan agaknya membuahkan hasil serta membuktikan bahwa kemampuan atlet Indonesia pun semakin dapat diperhitungkan di ajang internasional. Dalam hal ini, pembinaan olahraga yang berbasis praktik Sains Olahraga menggabungkan berbagai ilmu seperti fisiologi. psikologi, biomekanika, nutrisi, dan kedokteran olahraga memang telah digunakan oleh negara-negara maju untuk merancang terciptanya atlet yang mumpuni untuk lebih meningkatkan kinerja tubuh, dan tentu saja berkenaan dengan itu, prosesnya tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba.

Proses pembinaan yang lama dan harus dilakukan dengan tekun termasuk salah satuhal yang mendasari keengganan seseorang untuk menjadi atlet. Hal tersebut agaknya dapat dipahami. Selain perlunya pelatihan berkesinambungan yang cukup lama, asupan gizi yang seimbang demi menjaga kebugaran tubuh pun sangat penting untuk membangun ketahanan tubuh dan gerak refleks. Di sisi lain, kesempatan untuk berlomba baik di dalam maupun di luar negeri juga diperlukan untuk memacu prestasi, meningkatkan mental daya juang, dan mengukur kemampuan seorang atlet yang biasanya akan mencapai titik prestasi maksimal pada usia 30an. Pertandingan berbagai cabang olahraga pada pesta olahraga yang diatur di bawah komite olimpiade memang tidak mempersyaratkan batasan umur namun tetap saja usia dapat berpengaruh pada ketahanan tubuh. Berkenaan dengan usia pula, sangat menarik melihat jauhnya

perbedaan umur peraih medali Indonesia yaitu Bunga Nyimas peraih medali perunggu cabang olahraga skateboard nomor womens street yang baru berumur 12 tahun, dengan Michael Bambang Hartono peraih medali perunggu cabang olahraga bridge nomor supermixed team yang berusia 78 tahun , namun keduanya mampu menjadi idola publik berkat prestasi yang diraih. Hal ini membuktikan bahwa tekad dan daya juang tidak terbatas pada umur belaka.

Euforia Asian Games 2018 membuat sejumlah atlet peraih medali emas, ataupun yang bukan peraih medali emas namun menunjukkan prestasi dan daya juang tinggi, segera menjadi idola para pemirsa televisi dan netizen yang setia memantau layar televisi, ataupun pos di media sosial. Peningkatan kemampuan para



atlet yang teruji tersebut membuat bonus demografi Indonesia terasa istimewa dan semakin menunjukkan pentingnya proses dalam mencapai sesuatu yang berharga. Hal yang semakin jarang terlihat di tengah budaya instan yang merasuk dalam kehidupan sehari-hari.

Proses yang tidak mudah untuk menjadi atlet profesional itu agaknya terbayarkan dengan pencairan bonus yang cepat. Publik pun turut bergembira dan terpana bersama para atlet kesayangan setelah bonus dengan total jumlah 210 miliar rupiah diserahterimakan kepada seluruh atlet yang telah berlaga beserta para pelatih dan asisten pelatih. Selain insentif yang telah tersurat, beragam bonus tambahan yang menarik membuat karier di bidang olahraga kini dinilai sebagai suatu hal yang menjanjikan dan bukan hanya layak



untuk sekadar hobi belaka. Ketekunan dalam menjalani segala latihan yang diperlukan serta menjaga tubuh agar tetap tahan tempaan terbukti dapat membuahkan hasil.

Meskipun telah cukup banyak dalam pembinaan perbaikan olahraga, namun untuk menjaga keberlanjutanannya perlu terus diupayakan berbagai acara olahraga yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sejumlah terobosan telah mulai dibuat para penggiat olahraga dengan menjadikan olahraga tidak hanya untuk keperluan kesehatan namun juga sebagai tontonan. Olahragawan pun perlu menjadi penampil yang baik. Kinerja yang baik di lapangan disertai kemampuan sebagai penampil yang menguasai panggung dan emosi penonton adalah modal kuat bagi seorang atlet. Untuk mendorong hal dan Amerika Serikat di belahan dunia lain. Pembinaan olahraga tersebut memang pada awalnya dimotori Angkatan Bersenjata untuk menjamin ketersediaan dan kesiapsediaan personel yang bugar untuk keperluan perang, namun di masa damai pun, program olahraga tetap dijalankan. Dengan adanya tiga peraih medali Asian Games 2018 serta sejumlah atlet lain yang berasal dari TNI, bisa jadi TNI dapat terlibat dalam pembinaan berbagai cabang olahraga secara jauh lebih intensif lagi ke depannya, bukan hanya membuka ruang bagi para atlet untuk menjadi anggota TNI.

Pembinaan olahraga tentunya tidak terlepas dari fasilitas infrastruktur yang ada. Infrastruktur olahraga di sejumlah kota seperti Jakarta dan Palembang telah cukup baik. Namun, untuk menjadi tuan rumah Acara Olahraga internasional sekelas *Asian Games*, perlu dilakukan sejumlah

tersebut, fasilitasi kegiatan olahraga pun perlu didukung sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan standar internasional sehingga kemampuan para atlet pun dapat berada di taraf internasional, dan kecanggungan untuk berlaga di negara lain dapat diminimalisasikan.

Terkait pembinaan olahraga, agaknya Indonesia perlu meniru Cina yang memiliki program 15 tahun untuk pembinaan olahraga. Bahkan 30-40% penduduk Cina saat ini dapat dimobilisasi sebagai atlet. Kebugaran penduduk menjadi hal utama yang diperhatikan pemerintah Cina yang saat ini memberlakukan Program Kebugaran Fisik Negara. Dalam hal ini, investasi negara di bidang olahraga dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran umum cukup besar. Hal serupa juga dilakukan Jerman, Finlandia, Perancis, perbaikan baik pada stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ataupun Gelora Sriwijaya, Palembang, termasuk juga penambahan sarana prasarana yang mampu menampung 20.000 orang termasuk atlet, ofisial, dan para sukarelawan yang membantu kelancaran acara. Pembangunan sejumlah sarana pendukung lain pun dipercepat pembangunannya seperti Jakarta LRT dan MRT yang sayangnya belum siap dipergunakan berlangsung, saat acara serta Palembang LRT dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring Sport City, serta sejumlah pendukung fasilitas jalan menjadi jalur lalulintas mereka yang terlibat dalam Asian Games. kemajuan Tentunya infrastruktur menjadi bagian dari keuntungan penyelenggaraan kegiatan olahraga yang kemudian dapat dipergunakan lagi untuk berbagai acara selanjutnya. Keuntungan ini agaknya didapatkan seluruh kota tempat terselenggaranya

ajang olahraga di bawah Komite Olimpiade Internasional mengingat tujuan dari Gerakan Olimpiade adalah untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan memberi pendidikan kepada anak mudanya melalui olahraga yang dipraktikkan tanpa diskriminasi apa pun dalam dalam semangat Olimpik, yang membutuhkan pemahaman bersama dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan permainan yang adil.

Terlepas dari keberadaan sejumlah infrastruktur baru atau diperbarui untuk pembinaan olahraga, keuntungan lain yang didapat kota penyelenggara Asian Games adalah di sisi pariwisata. Pada saat penyelenggaraan pesta olahraga, pekerjaan paruh waktu pun dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi para sukarelawan. Meskipun demikian, sejumlah penurunan kegiatan ekonomi dapat saja terjadi di tempat lain, mengingat diberlakukannya rekayasa lalulintas di sejumlah tempat baik di Jakarta maupun Palembang, termasuk

pemberlakuan kebijakan transportasi Ganjil-Genap, serta sejumlah kegiatan kerja yang kemungkinan terdampak sebagai akibat banyaknya pegawai yang juga ingin menjadi saksi perolehan medali emas Indonesia meskipun lewat layar kaca. Hal yang umum terjadi khususnya pada saat-saat penayangan sejumlah cabang olahraga favorit, seperti bulutangkis yang memang kemudian mendapatkan medali emas untuk nomor tunggal putra dan ganda putra.

Bela Negara

Asian Games 2018 Ajang yang menjadi trending topic di Indonesia dengan perolehan medali yang melampaui target berhasil menyingkirkan sesaat berbagai obrolan dan debat terkait politik. Agaknya, selain pertunjukan yang menghibur serta tontonan olahraga tingkat internasional, dengan terselenggaranya Asian Games 2018 mendapatkan banasa Indonesia pelajaran berharga dalam demokrasi serta dalam hal memilah

antara fakta dan fiksi. Hal ini dipicu penampilan Presiden Joko Widodo yang mengendarai motor pada saat upacara pembukaan yang kemudian memicu cukup banyak perdebatan, hingga momen pelukan persahabatan antara atlet Hanifan Yudani pemenang emas cabang olahraga pencak silat dengan dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akan bersaing di pemilihan umum 2019. Kesemuanya menjadi pembelajaran demokrasi yang menarik, bahwa kepentingan Indonesia tetap harus didahulukan tidak peduli siapa pun presidennya. Pembelajaran berdemokrasi terjadi melalui tampilan kerja sama seluruh pihak yang terlibat sehingga acara upacara pembukaan dapat tampil dengan gemilang. Pemirsa pun sangat terpukau dengan persembahan Tari Ratoeh Jaroeh yang sejatinya adalah simbol toleransi dan kemauan bekerja sama. Simbolisme gerakan tari inilah yang sepatutnya menjadi contoh dalam kegiatan bela negara. Gerak serentak yang dinamis namun hentakan yang ada perlu dibangun





bersama untuk menciptakan efek gelombang ataupun efek dahsyat lain yang hendak diciptakan.

Ajang olahraga ini pun menjadi arena untuk membangun empati. Betapa Anthony Ginting dihujat di sosial media akibat kram yang dialami namun pertunjukan empati oleh lawannya, Shi Yugi dari China kemudian mendapat simpati dari penonton Indonesia. Hal serupa terlihat pula di beberapa pertandingan lain di mana terlihat atlet dari berbagai bangsa saling mengucapkan selamat untuk kemenangan dan menghibur apabila ada yang cedera. Meskipun masing-masing atlet mengusung simbol-simbol nasionalismenya sendiri, namun sportivisme dan persahabatan semangat tetap terjaga. Beragam kisah haru biru pun mewarnai berbagai lomba, seperti Lalu Mohammad Zohri yang tetap fokus bertanding dengan tuntutan untuk tetap bertanding di kelas senior saat keluarganya di Lombok mengalami bencana gempa, demikian pula sejumlah pendukung acara lainnya telah menjadi contoh nyata betapa kepentingan nasional didahulukan dari kepentingan pribadi. Ajang Asian Games adalah perwujudan dan ajang pembuktian Mens sana in

corpore sano - di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat dan akhirnya terdapat pikiran yang sehat pula. Di ajang internasional seperti ini, kesempatan untuk membela nama bangsa pun terbuka untuk siapa saja tanpa melihat suku, agama, ras, ataupun golongan berdasarkan status ekonomi.

Perhelatan besar olahraga semacam Asian Games memang ajang para atlet dari berbagai penjuru Asia tampil membela negaranya masing-masing. Tentu semua ingin menang, karena mendengar lagu kebangsaan yang berkumandang dan melihat bendera yang dinaikkan adalah kebahagian tersendiri. Setidaknya, untuk Asian Games kali ini, Indonesia Raya telah terdengar dan Sang Saka Merah Putih ditempatkan di posisi tertinggi 31 kali. Indonesia membuktikan diri mampu berlaga di ajang olahraga internasional dengan kedudukan sebagai empat besar. Harapannya tentu saja, demam olahraga ini tidak terhenti setelah acara ini berakhir, namun tetap terus terjaga agar nasionalisme, semangat juang dan energi positif untuk kemajuan Indonesia tidak menjadi pudar.

Penutup

Komite Olimpiade Internasional penyelenggaraan memuji Asian Games 2018. Indonesia dianggap berhasil dalam menampilkan semangat olimpik. Semangat olimpik ini dilandasi filsafat untuk menumbuhkan dan menggabungkan di dalam hidup suatu keseimbangan kualitas tubuh, upaya, dan pikiran. Dengan menggabungkan olahraga dengan budaya dan pendidikan, semangat olimpik berupaya untuk menciptakan cara kehidupan berbasis sukacita yang ada dalam upaya dan nilai pendidikan yang berkenaan dengan contoh yang baik serta sikap saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip etika yang berlaku universal. Keberhasilan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 juga membuat Indonesia dapat mengajukan diri menjadi tuan rumah *Olympic Games* 2032 , sebuah perhelatan olahraga dunia dengan skala yang lebih besar lagi.

Spirit Asian Games 2018 apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya mendukung semakin berkobarnya semangat bela negara. Hal ini tampak dalam lagu tema Meraih Bintang: Ini saat yang kutunggu, hari ini kubuktikan, kuyakin aku kan menang, hari ini kan dikenang, semua doa kupanjatkan, sejarah kupersembahkan, Yo yo ayo... kita datang, kita lihat, kita menang . Lagu ini telah berkumandang tidak hanya di ajang *Asian Games*, tetapi juga di berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada saat acara wisuda terkini , bahkan di sejumlah fasilitas umum seperti bandar udara. Kesuksesan dan energi positif Asian Games 2018 agaknya telah menjelma dalam bentuk kebanggaan menjadi Indonesia, karena dengan

penuh sukacita, publik Indonesia bersama para atlet kebanggaannya meneriakkan yel-yel yang kini menjadi sangat populer: "Siapa Kita? INDONESIA!"***

Daftar Pustaka

- Adyaksa Vidi. Agustus 22, 2018. Presiden Jokowi Apresiasi Kontingen Korea Bersatu saat Berlaga di Asian Games 2018. (diakses 2 September 2018). https://www.bola. com/asian-games/read/3625111/ presiden-jokowi-apresiasi-kontingenkorea-bersatu-saat-berlaga-di-asiangames-2018
- Antara. 16 Desember 2017. Mulai Gencar Menyapa, Ini Fakta Tentang Maskot Asian Games 2018. (diakses 2 September 2018). https://sport.tempo.co/read/1042764/ mulai-gencar-menyapa-ini-fakta-tentangmaskot-asian-games-2018/full&view=ok
- Ardhianto Wahyu Indraputra. BolaSport.
 2 September 2018. Asian Games 2018 Terpaut 66 Tahun, Peraih Medali Termuda dan Tertua Ternyata Berasal dari Indonesia. (diakses 5 September 2018). https://www.bolasport.com/ragam/302618-asian-games-2018--terpaut-66-tahunperaih-medali-termuda-dan-tertuaternyata-berasal-dari-indonesia?page=1
- BBC. Asian Games 2018: Korea Bersatu raih emas pertama mereka dalam sejarah.27 Agustus 2018. https://www. bbc.com/indonesia/olahraga-45318902 (diakses 2 September 2018).

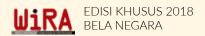
- Callistasia Anggun Wijaya. Covering Kali Item is useless: Urbanist. 27 Juli http://www.thejakartapost. 2018. com/news/2018/07/27/covering-kaliitem-is-useless-urbanist.html (diakses 1 September 2018); The Jakarta Post. "Ministry installs nano bubble equipment for Sentiong River". The Jakarta Post. 12 Agustus 2018. http://www. thejakartapost.com/news/2018/08/12/ ministry-installs-nano-bubble-equipmentfor-sentiong-river.html (diakses September 2018).
- Channel NewsAsia. Turkmen doping case puts wrestling under pressure at Asian Games. 24 Agustus 2018. https:// www.channelnewsasia.com/news/ sport/turkmen-doping-case-putswrestling-under-pressure-at-asiangames-10648448 (diakses 2 September 2018).
- Fabian Juanuarius Kuwado. Cerita Indonesia Jadi Tuan Rumah Asian Games 1962 dan 2018, Yuk Lihat Pamerannya. 21 Mei 2018. https://nasional.kompas. com/read/2018/05/21/11573311/ cerita-indonesia-jadi-tuan-rumah-asiangames-1962-dan-2018-yuk-lihat (diakses 2 September 2018).
- Guoqi Xu dan William C Kirby. Olympic Dreams: China and Sports, 1895-2008.
 Harvard: Harvard University Press, 2008.
- Hawalli Kuwait: Olympic Council of Asia, 2017. Olympic Council of Asia. Constitution and Rules.
- https://www.olympic.org/tokyo-2020 (diakses 3 September 2018). *Olympic*

- International Committee April 2018. International Olympic Committee. Olympic Charter. Lausanne: International Olympic Committee, 2003. Tokyo 2020.
- https://id.asiangames2018.id/traffic/ jakarta-cluster-2 (diakses 3 September 2018). Kebijakan Transportasi Asian Games 2018. 18 Agustus 2018.
- https://id.asiangames2018.id/traffic/ jakarta-cluster-1 (diakses 3 September 2018). Rekayasa Lalulintas Jakarta Cluster1. 18 Agustus 2018.
- https://id.asiangames2018.id/traffic/ palembang (diakses 3 September 2018).
 Rute Pengalihan Arus Kendaraan Pribadi Selama Asian Games 2018. 18 Agustus 2018.
- https://en.asiangames2018.id/medals/ 2 September 2018. (diakses 3 September 2018) *Medals*.
- https://news.detik.com/berita/4196492/cerita-di-balik-flashmobasian-games-bandara-bandung-yang-viral, 4 September 2018. (diakses 5 September 2018). Indah Mutiara Kami. Cerita di Balik Flashmob Asian Games Bandara Bandung yang Viral.
- https://www.olympic.org/news/ olympic-highlights-1255, 3 September 2018. (diakses 5 September 2018). Olympic Highlights.
- International Olympic Committee 2017.
 Olympic Charter. Lausanne: International Olympic Committee.

- International Olympic Committee, 3 September 2018.. Olympic Highlights.
- Kompas. 29 Agustus 2018. Atlet Pencak Silat Raih Emas, Prabowo dan Jokowi Berpelukan.. https://nasional.kompas. com/read/2018/08/29/17441891/ atlet-pencak-silat-raih-emas-prabowodan-jokowi-berpelukan (diakses 3 September 2018).
- Kompas.com. 2 September 2018. Prestasi Indonesia di Asian Games 2018: Bukti Praktik "Sport Science"? h t t p s://s a i n s . k o m p a s . c o m/ read/2018/09/02/173500823/prestasiindonesia-di-asian-games-2018-buktipraktik-sport-science?page=all (diakses 5 September 2018).
- M Hafidz Imaduddin. 9 Agustus 2018. Gempa Lombok Sempat Surutkan Semangat Zohri Hadapi Asian Games 2018. https://olahraga.kompas.com/ read/2018/08/09/14262798/gempalombok-sempat-surutkan-semangat-zohrihadapi-asian-games-2018 (diakses 5 September 2018).
- M Hafidz Imaduddin. Agustus 22, 2018.. Final Bulu Tangkis Asian Games, Ginting Cedera, Indonesia Tertinggal. https://olahraga.kompas.com/ read/2018/08/22/19355958/final-bulutangkis-asian-games-ginting-cederaindonesia-tertinggal (diakses 3 September 2018).
- Pay Siburian, Rastamanis, dan Rustam. Jakarta. 2018. Meraih Bintang (Lirik Lagu) Dinyanyikan oleh Via Valen.

- Putri Vindiasari. 1 September 2018. Euforia Wisuda UI dan UGM Bawakan Lagu Asian Games, Suasananya Meriah. https://www.brilio.net/wow/euforiawisuda-ui-ugm-bawakan-lagu-asiangames-suasananya-meriah-180901o. html (diakses 3 September 2018).
- Rudy Polycarpus. 2 September 2018. Media Indonesia 210 Miliar, Bonus untuk Atlet hingga Asisten. http://mediaindonesia.com/read/detail/182154-210-miliar-bonus-untuk-atlet-hingga-asisten-pelatih (diakses 5 September 2018).
- South China Morning Post. September 2, 2018. Asian Games: China on top at Asiad again but Japan gaining in swimming and other key Olympic sports ahead of Tokyo 2020. https://www.scmp.com/sport/ china/article/2162406/asian-gameschina-top-asiad-again-japan-gainingswimming-and-other-key (diakses 5 September 2018).
- Stefan Hübner. (2012): The International Journal of the History of Sport Vol. 29. No. 9 halaman 1295-1310.
- Surya Citra Televisi (SCTV). 18 Agustus 2018. "Presiden Joko Widodo Meriahkan Opening Ceremony Asian Games 2018". https://www.youtube.com/ watch?v=SD2EhzpVvBc (diakses 1 September 2018).
- Yanu Arifin. 16 Agustus 2018. Tentang Bobroknya Pengelolaan Tiket Asian Games 2018. https://sport.detik.com/ sport-lain/4170190/tentang-bobroknya- pengelolaan-tiket-asian-games-2018 (diakses 2 September 2018).

- Yudono Yanuar. 11 April 2018. Antara. Kalla Pastikan LRT Jakarta Tidak Siap untuk Asian Games. https://asiangames. tempo.co/read/1078514/kalla-pastikanlrt-jakarta-tidak-siap-untuk-asiangames-2018 (diakses 5 September 2018).
- Vessy Dwirika Frizona. 18 Agustus 2018
 7 Sosok Pria di Balik Spektakulernya
 Pembukaan Asian Games 2018. https://
 www.msn.com/id-id/olahraga/pesta olahraga-asia-2018/7-sosok-pria-di balik-spektakulernya-pembukaan-asian games-2018/ar-BBM5raw?li=AAAmVV6
 (diakses 1 September 2018).
- Weni Arfiyani. Brilio. 18 Agustus 2018. 12
 Prajurit TNI ini berjuang di Asian Games, 2
 di antaranya paspampres. https://www.
 brilio.net/olahraga/12-prajurit-tni-ini berjuang-di-asian-games-2-di-antaranya paspampres-180828j.html (diakses 1
 September 2018).
- Xinhua. 2 September 2018. Japan's swimmer Ikee named Asian Games' MVP. Xinhuanet. Xinhuanet.com. (diakses 5 September 2018).



GALERI FOTO KEGIATAN BELA NEGARA



























